

LAPORAN

KAJIAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN OPTIMASI USAHA PERIKANAN



Kerja Sama :

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur



Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman

Tahun 2022

**KAJIAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
DAN OPTIMASI USAHA PERIKANAN**

**Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur**

Bekerjasama dengan

**Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman**

**S A M A R I N D A
2 0 2 2**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH Tuhan Yang Maha Esa, yang atas ijin dan rahmatNya, penyusunan laporan penelitian "**KAJIAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN OPTIMASI USAHA PERIKANAN**" dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan – Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini tim penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu kegiatan penelitian hingga penyusunan materi tulisan ini yaitu: 1). Dinas Kelautan dan Perikanan – Provinsi Kalimantan Timur atas kesempatan kerjasama yang telah diberikan serta bantuan data dan informasi tentang kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya di wilayah pesisir dan perairan umum Provinsi Kalimantan Timur, 2). Masyarakat atas partisipasinya dalam memberikan informasi dan data aktual yang dibutuhkan dalam penyusunan hasil kajian ini, 3). Narasumber, pemangku kepentingan dan instansi terkait atas partisipasinya dalam memberikan informasi dan data aktual dan relevan dengan tujuan penelitian.

Semoga laporan kegiatan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama dalam hal penyusunan laporan "**KAJIAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN OPTIMASI USAHA PERIKANAN**"

Hormat Kami,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup Tujuan.....	3
1.4. Keluaran	3
1.5. Metode Kajian.....	3
2. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1. Keadaan Geografis dan Administratif.....	12
2.2. Kependudukan	14
2.3. Kondisi Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur	16
2.4. Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	18
3. TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN	
3.1. Nelayan Perikanan Laut.....	21
3.2. Nelayan Perikanan Perairan Umum Daratan	27
4. TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL	
4.1. Tingkat Kesejahteraan Nelayan	34
5. ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL KERAGAAN USAHA PERIKANAN	
5.1. Keragaan Investasi Usaha Masyarakat Pesisir/Perikanan Laut .	44
5.2. Keragaan Investasi Usaha Masyarakat Perikanan Umum Daratan.....	51

6. DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN	
6.1. Perikanan Tangkap Perairan Laut	57
6.2. Perikanan Tangkap Umum Daratan	62
7. STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN	
7.1. Identifikasi Faktor - Faktor Strategis Internal	69
7.2. Identifikasi Faktor - Faktor Strategis Eksternal.....	70
7.3. Evaluasi Faktor Internal	71
7.4. Evaluasi Faktor Eksternal	73
7.5. Matriks SWOT	77
8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
8.1. Kesimpulan	86
8.2. Rekomendasi	86

DAFTAR TABEL

1.1. Jadwal Kegiatan Kajian.....	4
1.2. Matriks Evaluasi Faktor Internal.....	9
1.3. Matrik Evaluasi Faktor Eksternal.....	10
1.4. Matriks SWOT	10
1.5. Matrik <i>Quantitative Strategies Planning Matrix</i> (QSPM).....	11
2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.....	13
2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur.....	15
2.3. Produksi Perikanan Laut Lima Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur.....	16
2.4. Produksi Perikanan Perairan Umum Lima Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur	17
2.5. Rumah Tangga Perikanan (RTP) Lima Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur	19
3.1. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Bagan.....	22
3.2. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Rengge Udang	24
3.3. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Rengge Ikan.....	26
3.4. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Rengge.....	29
3.5. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Pengilar	31
3.6. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Lukah	33
4.1. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Penerima Program Sosial	36
4.2. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Pesisir Penerima Program Sosial	38
4.3. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Perairan Umum Daratan Penerima Program Sosial.....	41
5.1. Kriteria Investasi Usaha Perikanan Laut	44
5.2. Kriteria Investasi Usaha Perikanan Umum Daratan	51
6.1. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Bagan ...	58
6.2. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Rengge Udang.....	60
6.3. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Rengge Ikan.....	61

6.4. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Rengge .	63
6.5. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Pengilar	65
6.6. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Lukah ...	66
7.1. Hasil Evaluasi Faktor Internal dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur.....	71
7.2. Hasil Evaluasi Faktor Eksternal dalam pengembangan Program Pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur	75
7.3. Matriks SWOT dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur	78
7.4. Matriks QSPM dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur	81
7.5. Matriks Alternatif Strategi QSPM Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur.....	83

DAFTAR GAMBAR

1.1. Kerangka Formulasi Strategis (David, 2004).....	9
2.1. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	18
7.1. Profil Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur	77

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi perikanan yang cukup besar karena letaknya berbatasan dengan sebagian Selat Makasar dan Laut Sulawesi dengan garis pantai sepanjang 3.925 km. Potensi perikanan Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat dari volume produksi perikanan di tahun 2021 sebesar 334.236 ton yang meliputi perikanan tangkap sebesar 173.996 ton dan budidaya sebesar 160.240 ton. Volume perikanan tangkap di provinsi ini mengalami peningkatan yang relative kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 produksi perikanan Provinsi Kalimantan timur tercatat sebesar 326.621 ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,75% (BPS Kaltim, 2022).

Selain itu, potensi perikanan di provinsi ini terlihat dari nilai produksi perikananannya di tahun 2021 yang mencapai 10.305,23 miliar rupiah yang meliputi perikanan tangkap sebesar 5.502,22 miliar rupiah dan budidaya sebesar 4.803,01 miliar rupiah (BPS Kaltim, 2022). Perkembangan nilai produksi perikanan Provinsi Kalimantan Timur ini meningkat sebesar 7,76% dari tahun sebelumnya, dimana tercatat nilai produksi perikanan di tahun 2020 hanya sebesar 9.939,43 miliar rupiah (BPS Kaltim, 2022). Peningkatan volume dan nilai produksi ini memunculkan pertanyaan, apakah peningkatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir atau berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir. Selanjutnya, potensi perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang cukup besar jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kalimantan timur, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut terutama bagi masyarakat pesisir terutama bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Secara umum, penduduk miskin di Indonesia didominasi yang berada di daerah pesisir dan pedesaan. Kemiskinan terjadi Ketika masyarakat berada pada suatu

kondisi yang terbatas termasuk keterbatasan pada akses pada pendidikan, kesempatan berusaha, aksesibilitas pada faktor produksi dan fasilitas hidup lainnya (Ambar, 2004). Dalam konteks masyarakat pesisir, beberapa peran teknis yang menghambat kesejahteraan nelayan, pembudidaya, maupun pengolah hasil perikanan antara lain karakteristik usaha yang masih bersifat tradisional, struktur alat investasi yang berteknologi rendah, kemampuan pengetahuan yang relatif rendah dan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif.

Laporan BPS Kaltim (2022) mencatat jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2021 sebanyak 241,77 ribu (6,54%) atau mengalami penurunan sebanyak 2,22 ribu orang pada tahun sebelumnya. Meskipun terdapat data jumlah penduduk miskin secara keseluruhan, namun data terkait asal wilayah penduduk miskin terutama jumlah penduduk miskin atau penduduk yang belum sejahtera di wilayah pesisir tidak terdokumentasi dengan baik. Gambaran kesejahteraan masyarakat pesisir sangat penting diketahui agar program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah terutama dalam rangka mengurangi penduduk miskin di wilayah pesisir menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, baik melalui program bantuan alat dan input produksi, kemudahan akses permodalan, maupun program pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, dalam pelaksanaannya tidak diketahui apakah hasil dari semua program tersebut mampu memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, dan analisis dampak program pemberdayaan masyarakat terkait pengentasan kemiskinan dan optimasi usaha perikanan di wilayah pesisir. Selain itu diperlukan perumusan strategi kebijakan agar program pemberdayaan tetap sasaran dan keberlanjutan program dapat tercapai.

1.2. Maksud dan Tujuan

- 1) Mengidentifikasi tingkat kesejahteraan rumah tangga perikanan di Kalimantan Timur
- 2) Menganalisis kinerja usaha yang dikelola oleh rumah tangga perikanan yang ada di Kalimantan Timur
- 3) Menganalisis dampak program pemberdayaan terhadap kinerja usaha dan tingkat kesejahteraan rumah tangga perikanan di Kalimantan Timur
- 4) Merumuskan strategi pengembangan usaha perikanan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga perikanan di Kalimantan Timur

1.3. Ruang Lingkup Tujuan

- 1) Penyusunan Rencana Kegiatan
- 2) Kordinasi dengan pihak terkait
- 3) Survei dan pengumpulan data sekunder
- 4) Penyusunan laporan akhir

1.4. Keluaran

Keluaran dari kajian ini adalah adanya dokumen laporan “**Kajian Dampak Program Pemberdayaan Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Optimasi Usaha Perikanan**” yang berisi:

- 1) Informasi dan hasil identifikasi terkait tingkat kesejahteraan rumah tangga perikanan di Kalimantan Timur
- 2) Informasi dan hasil analisis terkait kinerja usaha rumah tangga perikanan yang ada di Kalimantan Timur
- 3) Informasi dan hasil analisis dampak program pemberdayaan terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga perikanan pesisir di Kalimantan Timur
- 4) Bahan acuan dan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan strategi pengembangan usaha perikanan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga perikanan di Kalimantan Timur

1.5. Metode Kajian

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan Studi

Kegiatan “Kajian Dampak Program Pemberdayaan Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Optimasi Usaha Perikanan” dilaksanakan selama 3 bulan berdasarkan data hasil

survey (sampel) di wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Kajian

No.	Uraian	Bulan ke-		
		1	2	3
1.	Persiapan dan koordinasi	x		
2.	Verifikasi data	x		
3.	Laporan pendahuluan	x		
4.	Konsultasi dan revisi		x	
5.	Draft laporan akhir		x	
6.	Laporan akhir			x

2) Analisis Data

a) Identifikasi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi tingkat kesejahteraan menggunakan nilai tukar masyarakat pesisir yang meliputi nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan di lokasi studi dan dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut :

- **Perhitungan Nilai Tukar Nelayan / Pembudidaya / Pengolah Hasil Perikanan (NTN / NTPi)**

$$NTN / NTPi = Y_t / E_t$$

$$Y_t = YF_t + YNF_t$$

$$E_t = EF_t + EK_t$$

Dimana:

YF_t = Total pendapatan nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan dari usaha perikanan periode t

YNF_t = Total pendapatan nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan dari usaha non perikanan periode t

EF_t = Total pengeluaran nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan untuk usaha perikanan periode t

EK_t = Total pengeluaran nelayan untuk konsumsi keluarga nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan periode t

t = Periode waktu

- **Perhitungan Indeks Nilai Tukar Nelayan / Pembudidaya / Pengolah Hasil Perikanan (INTN / INTPI)**

$$\text{INTN} / \text{INTPI} = (\text{IY}_t / \text{IE}_t) \times 100 \%$$

$$\text{IY}_t = (\text{Y}_t / \text{Y}_{td}) \times 100 \%$$

$$\text{IE}_t = (\text{E}_t / \text{E}_{td}) \times 100 \%$$

Dimana :

INTN / INTPI = Indeks nilai tukar nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan periode t

IY_t = Indeks total pendapatan nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan dari usaha perikanan periode t

Y_t = Total pendapatan keluarga nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan periode t (harga periode berlaku)

Y_{td} = Total pendapatan keluarga nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan periode dasar (harga periode dasar)

IE_t = Indeks total pengeluaran keluarga nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan periode t

E_{td} = Total pengeluarankeluarga nelayan / pembudidaya / pengolah hasil perikanan periode t

t = Periode sekarang

td = Periode dasar; dimana INTN periode tahun dasar = 100

b) Analisis Kinerja Usaha Perikanan

Analisis kinerja usaha perikanan menggunakan analisis kelayakan finansial yang berfungsi mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan, manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari usaha perikanan. Analisis finansial dalam kajian ini meliputi analisis kriteria investasi dan analisis sensitivitas. Kriteria-kriteria investasi yang dianalisis meliputi *net present value* (NPV), *net benefit-cost ratio* (Net BCR) serta *internal rate of return* (IRR).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

- a. Data yang digunakan dalam analisis usaha perikanan meliputi *benefit* dan *cost*, bersumber dari data primer yang berkaitan erat dengan usaha masyarakat pesisir dan disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana kegiatan berlangsung.

- b. Umur usaha ditetapkan selama lima tahun, berdasarkan umur teknis dari komponen utama peralatan investasi.
- c. Jumlah produksi rata-rata bersifat konstan selama masa analisis, yaitu lima tahun.
- d. Penerimaan kas berasal dari hasil penjualan produksi usaha perikanan per tahun, nilai penyusutan dan nilai residu yang terjadi pada tahun-tahun tertentu, dimana masa pakai peralatan investasi telah berakhir.
- e. Tingkat diskonto (*discount rate*) atau OCC yang digunakan adalah tingkat suku bunga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu sebesar 15 %.

Variabel Analisis Finansial Usaha Berbasis Kriteria Investasi

- **Kriteria Investasi**

Analisis ini menggunakan kriteria investasi terdiskonto. Kadariah dkk (1978), menyatakan bahwa kriteria investasi dapat digunakan untuk mencari suatu ukuran secara menyeluruh tentang baik tidaknya suatu usaha. Beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) **Net Present Value**

NPV yaitu selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang.

Nilai NPV diperoleh dari :

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{Bt - Ct}{(1+i)^t}$$

Keterangan :

Bt = *Benefit* kotor pada tahun t (Rp)

Ct = Biaya kotor pada tahun t (Rp)

n = Umur ekonomis usaha (tahun)

i = Tingkat bunga yang berlaku (%)

t = Tahun

Kriteria investasi ini menjelaskan bahwa :

- jika $NPV > 0$, maka usaha tersebut layak untuk di lanjutkan.
- jika $NPV \leq 0$, maka usaha tersebut mencapai titik impas atau yang dinamakan *Break Even Point*, sehingga tidak layak untuk dilanjutkan.

b) *Internal Rate of Return (IRR)*

IRR merupakan tingkat bunga yang membuat nilai NPV sama dengan nol.

Nilai IRR diperoleh dari :

$$IRR = i' \frac{NPV'}{NPV' - NPV''} (i'' - i')$$

Keterangan :

NPV' = *Net Present Value* positif (Rp)

NPV'' = *Net Present Value* negatif (Rp)

i' = *Discount rate* yang memberikan nilai NPV positif (%)

i'' = *Discount rate* yang memberikan nilai NPV negatif (%)

Kriteria investasi ini menjelaskan bahwa :

- Jika $IRR > OCC$, maka usaha layak untuk dilanjutkan.
- Jika $IRR \leq OCC$, maka usaha tidak layak untuk dilanjutkan.

c) *Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)*

Net B/C Ratio merupakan perbandingan antara manfaat bersih dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang, dimana pembilang bersifat positif dan penyebut bersifat negatif.

Nilai B/C Ratio diperoleh dari :

$$Net\ B/C = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{Bt - Ct}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{Ct - Bt}{(1+i)^t}}$$

Keterangan :

Bt = *Benefit* (manfaat) kotor pada tahun t (Rp)

Ct = *Cost* (biaya) kotor pada tahun t (Rp)

n = Umur ekonomis (tahun)

i = Tingkat bunga yang berlaku (%)

t = Tahun

Kriteria investasi ini menjelaskan bahwa :

- a) Jika $Net\ B/C > 1$, maka usaha tersebut layak untuk dilanjutkan.
- b) Jika $Net\ B/C \leq 1$, maka usaha tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

- **Analisis Kepekaan (*Sensitivity Analysis*)**

Kadariah, dkk (1978), menyebutkan bahwa *Sensitivity Analysis* bertujuan untuk melihat apa yang terjadi dengan hasil analisis proyek, jika terdapat suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau *benefit*.

Skenario sensitivitas yang diperkirakan yaitu :

- a) Kondisi Aktual
- b) Harga penjualan turun hingga k% dan hasil produksi turun hingga k%.
- c) TC (Operasional dan *Maintenance*) naik hingga k%

- c) **Analisis Dampak Program Pemberdayaan terhadap Tingkat Kesejahteraan**

Analisis dampak menggunakan model *Propensity Score matching* (PSM) dengan membandingkan perbedaan rata-rata variabel *outcome* antara kelompok masyarakat pesisir yang memperoleh program pemberdayaan dan kelompok masyarakat peisisir yang tidak atau belum memperoleh program pemberdayaan. Dampak pendapatan atau tingkat kesejahteraan masyarakat peisisir dilambangkan dengan *Average Treatment Effects on the Treated* (ATT) dan dinyatakan secara formal sebagai:

$$ATT = E(Y_1 - Y_0 | x, D = 1) = E(Y_1 | x, D = 1) - E(Y_0 | x, D = 1)$$

Dimana:

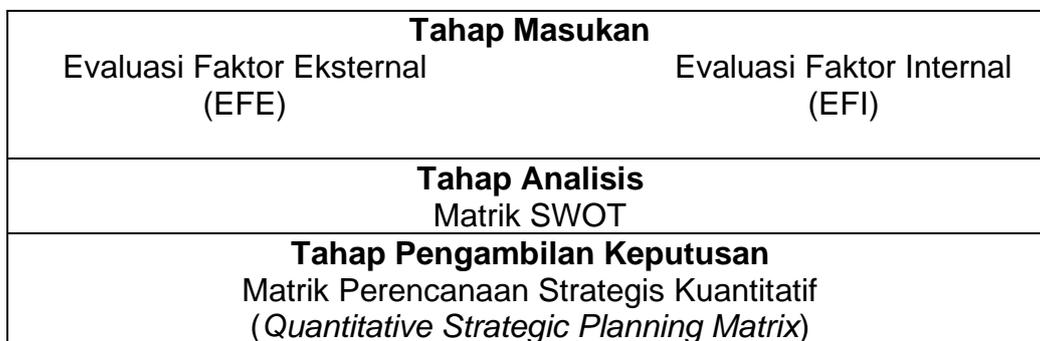
- D : variabel indikator sama dengan 1 (satu) jika kelompok masyarakat pesisir yang memperoleh program pemberdayaan dan 0 (nol) sebaliknya.
- Y_1 : *Outcome* dari kelompok masyarakat pesisir yang memperoleh program pemberdayaan
- Y_2 : *Outcome* dari kelompok masyarakat pesisir yang tidak atau belum memperoleh program pemberdayaan

Dalam kajian ini, dua model: : *nearest neighbor matching* (NNM) and *kernel-based matching* (KBM)) digunakan untuk mencocokkan pengamatan dari kelompok masyarakat pesisir yang memperoleh program pemberdayaandan dan yang tidak.

- d) **Strategi Pengembangan Sektor Perikanan terhadap Tingkat Kesejahteraan**

Penentuan strategi pengembangan menggunakan *quantitative strategic planning matrix* (QSPM). Proses penyusunan strategi dilakukan dengan melalui tiga tahap

analisis, yaitu tahap masukan, tahap analisis, dan tahap keputusan. Tahap akhir dari analisis ini adalah memformulasikan keputusan yang akan diambil. Keputusan didasarkan atas justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun kuantitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga dapat diambil keputusan yang signifikan dengan kondisi yang ada.



Gambar 1.1. Kerangka Formulasi Strategis (David, 2004)

- **Evaluasi Faktor Internal (*Internal Factor Evaluation*)**

Evaluasi faktor internal (IFE) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2. Matriks Evaluasi Faktor Internal

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Kekuatan (<i>strengths</i>)			
1			
2			
3			
	Kelemahan (<i>weakness</i>)			
1			
2			
3			
	Total	1		

- **Evaluasi Faktor Eksternal (*External Factor Evaluation*)**

Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal. Faktor Eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga. Hasil analisis eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang ada serta seberapa baik strategi yang telah digunakan selama ini dan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3. Matrik Evaluasi Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Peluang (<i>Opportunities</i>)			
1			
2			
3			
	Ancaman (<i>Threats</i>)			
1			
2			
3			
	Total	1		

- **Analisis Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT)**

Analisis SWOT merupakan alat untuk memaksimalkan peranan faktor yang bersifat positif, meminimalisir kelemahan dan menekan dampak ancaman yang timbul. Hasil analisis SWOT adalah berupa sebuah matrik yang terdiri atas empat kuadran yang terdiri dari perpaduan strategi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4. Matriks SWOT

Faktor Internal	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
Faktor Eksternal		
<i>Opportunities (O)</i>	Strategi S_O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats (T)</i>	Strategi S-T Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

- **Analisis Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM)**

Analisis *Quantitative Strategies Planning Matrix* (QSPM) merupakan teknik yang dipakai pada tahap pengambilan keputusan. Analisis QSPM merupakan teknik yang secara objektif dapat menetapkan strategi alternatif yang diprioritaskan. Analisis QSPM digunakan untuk evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan

key success factors, internal-eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Teknik ini secara jelas menunjukkan strategi alternatif mana yang paling baik untuk dipilih.

Tabel 1.5. Matrik *Quantitative Strategies Planning Matrix* (QSPM)

Faktor Kunci	Bobot	Alternatif Strategis			
		I		II	
		<i>Alternativen ess Score (AS)</i>	<i>Total Attractiven ess Score (TAS)</i>	<i>Alternativen ess Score (AS)</i>	<i>Total Attractiven ess Score (TAS)</i>
INTERNAL					
Kekuatan					
.....					
Kelemahan					
.....					
EKSTERNAL					
Peluang					
.....					
Ancaman					
.....					
Jumlah					
Rangking					

BAB

2

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografis dan Administratif

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan keempat di Indonesia dengan wilayah terluas sebesar 127.346,92 km². Secara geografis Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 113°35'31" dan 119°12'48" Bujur Timur dan 2°34'23" Lintang Utara serta 2°44'14" Lintang Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kalimantan Timur memiliki batas-batas -sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kalimantan Utara
- Sebelah Selatan : Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat : Kalimantan Barat
- Timur Laut Sulawesi dan Selat Makassar : Kalimantan Tengah, serta Negara Malaysia.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Mahakam.

Berdasarkan letak geografisnya Kalimantan Timur beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu.

Wilayah pesisir Kalimantan Timur yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi sebagai pembatas dengan Samudera Pasifik dan kondisi topografi yang sangat beragam, sehingga sangat mempengaruhi kondisi iklim di wilayah ini. Suhu udara rata-rata berkisar antara 22,7°C sampai 35,8°C. Suhu udara tertinggi di wilayah Stasiun Samarinda sebesar 35,8°C pada bulan Maret dan Desember sedangkan suhu terendah 23,2°C pada bulan Januari. Kelembaban udara tertinggi di bulan Juni dan September sebesar 97,0% dan terendahnya 39,0% pada bulan maret dan September. Kecepatan angin terbesar terjadi di bulan April sebesar 12,86 m/detik. Curah hujan terbanyak selama tahun 2020 adalah 282,50 mm dengan 26 hari hujan, dimana intensitas terbesar terjadi di bulan september. Sedangkan curah hujan terendah di bulan february yang mencapai 91,8 mm. Provinsi Kalimantan Timur secara administrasi terdiri dari 7 Kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser, Mahakam Ulu dan 3 Kota yaitu Balikpapan, Bontang dan Samarinda.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Per Kabupaten/Kota	
	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
Paser	11.096,96	8.71
Kutai Barat	13.709,92	10.77
Kutai Kartanegara	25.988,08	20.41
Kutai Timur	31.051,71	24.38
Berau	21.735,19	17.07
Penajam Paser Utara	2.923,73	2.30
Mahakam Ulu	19.449,41	15.27
Balikpapan	512,25	0.40
Samarinda	716,53	0.56
Bontang	163,14	0.13
Kalimantan Timur	127.346,92	100.00

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2020

Luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas yang beragam. Kabupaten Kutai Timur menjadi wilayah yang terluas dengan 31.051,71 ha (24,38%), kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 25.988,08 ha (20,41%).

Sementara itu luas wilayah yang terkecil berada pada Kota Bontang dengan 163,14 ha (0,13%), lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

2.2. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kalimantan Timur setiap tahunnya mencatat kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 3.047.479 jiwa, meningkat menjadi 3.721.389 pada tahun 2019. Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Timur telah bertambah lebih dari 673 ribu jiwa (BPS Kaltim, 2021). Penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3,7 juta jiwa, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,84 persen dari tahun 2020, yang berarti penambahan penduduk pada periode tersebut sebanyak 42 ribu jiwa.

Tenaga kerja adalah modal pembangunan ekonomi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan berubah seiring dengan berlangsungnya proses demokrasi. Tenaga kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja. Pada tahun 2021, angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1.846.547 orang yang terdiri dari 1.720.361 orang berstatus bekerja dan 126.186 orang berstatus pengangguran. Tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama di Provinsi Kalimantan Timur yang terbanyak berada di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 358.508.

Laju Pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur pada periode 2000- 2010 sebesar 2,37 persen, sedangkan pada periode 2010-2019 sebesar 1,79 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Pada tahun 2019 porsi terbesar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (23,45 persen), yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah penduduk terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (21,12 per sen) dan Kota Balikpapan (10,11 persen). Sisanya, 45,32 persen penduduk tersebar di tujuh kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan jenis kelamin seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki rasio jenis kelamin di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin untuk provinsi Kalimantan Timur adalah 108,41. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2013 tidak banyak berubah (BPS Kaltim, 2021).

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berjumlah 3.766.039 jiwa yang terdiri dari 1.961.634 laki-laki dan 1.961.634 perempuan. Penduduk yang paling banyak berada di Kota Samarinda yang mencapai total 827.994 orang, setelah itu penduduk yang paling banyak kedua adalah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai angka 729.382 orang, sedangkan penduduk yang paling sedikit berada di Kabupaten Mahakam Ulu yang mencapai angka 32.513 orang.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Paser	151.533	134.361	285.894
Kutai Barat	78.086	69.934	148.020
Kutai Kartanegara	412.529	373.593	786.122
Kutai Timur	203.586	172.525	376.111
Berau	124.807	107.480	232.287
Penajam Paser Utara	84.018	76.894	160.912
Mahakam Ulu	14.111	12.264	26.375
Balikpapan	338.202	316.976	655.178
Samarinda	451.099	421.669	872.768
Bontang	92.912	84.810	177.722
Kalimantan Timur	1.950.883	1.770.506	3.721.389

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 berjumlah 3.721.389 jiwa yang terdiri dari 1.950.883 laki-laki dan 1.770.506 perempuan dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) diatas 110,20. Jumlah penduduk tertinggi berada pada Kota Samarinda sebanyak 872.768 jiwa yang terdiri dari laki-laki 451.099 jiwa dan perempuan 421.669 jiwa. Kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua berada pada Kabupaten Kutai Kartanega dengan 655.178 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Mahulu memiliki jumlah penduduk yang terkecil dari 10 kabupaten/kota dengan 26.375 jiwa.

2.3. Kondisi Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur

Produksi perikanan tangkap menjadi salah satu usaha yang banyak dilakukan oleh nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. Produksi perikanan di Provinsi Kaltim lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi produsen perikanan tangkap laut terbesar di Kaltim selama empat tahun terakhir. Wilayah produksi perikanan terbesar berikutnya yaitu Kota Bontang.

Tabel 2.3. Produksi Perikanan Laut Lima Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Laut (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	10.660	10.825	11.308	10.949	6.462
2	Kubar	0	0	0	0	0
3	Kukar	33.233	38.535	35.461	34.405	45.832
4	Kutim	5.394	4.928	6.716	6.263	4.381
5	Berau	16.634	16.954	17.735	17.321	17.184
6	PPU	4.552	5.981	4.927	4.767	6.603
7	Mahulu	0	0	0	0	0
8	Balikpapan	4.725	3.831	5.022	4.874	4.266
9	Samarinda	9.635	12	15.550	9.961	13.749
10	Bontang	16.881	20.773	17.438	17.429	18.334
Kalimantan Timur		101.714	101.839	114.157	105.969	116.811

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Sementara itu Kabupaten Mahulu dan Kutai Barat tidak memiliki produksi perikanan laut, karena Kabupaten tersebut tidak memiliki perairan laut. Produksi perikanan terendah selanjutnya berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara. Produksi perikanan laut mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 0,1% dan pada tahun 2018 sebesar 5,9%. Selanjutnya di tahun 2019 produksi perikanan laut mengalami penurunan sebesar 4,5%.

Tabel 2.4. Produksi Perikanan Perairan Umum Lima Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan di Perairan Umum				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	112	112	117	77	103
2	Kubar	1.209	1.209	1.251	1.828	1.515
3	Kukar	33.851	33.851	33.983	49.655	31.775
4	Kutim	954	954	966	1.412	913
5	Berau	1.262	1.262	1.337	1.954	1.437
6	PPU	0	0	300	348	448
7	Mahulu	132	132	0	0	594
8	Balikpapan	0	0	0	0	0
9	Samarinda	6.601	6.601	5.184	836	5.113
10	Bontang	0	0	0	0	0
Kalimantan Timur		44.121	44.121	43.138	56.110	41.898

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Produksi perikanan perairan umum menjadi salah satu usaha yang banyak dilakukan oleh nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. Produksi perikanan di perairan umum di Provinsi Kaltim lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi produsen perikanan tangkap perairan umum terbesar di Kaltim selama empat tahun terakhir. Wilayah produksi perikanan terbesar berikutnya yaitu Kota Samarinda.

Sementara itu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Bontang dan Kota Balikpapan tidak memiliki produksi perikanan perairan umum, karena wilayah ini dominan berada di kawasan pesisir. Produksi perikanan di perairan umum terendah selanjutnya berada pada Kabupaten Mahulu. Produksi perikanan di perairan umum tidak mengalami perubahan di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan produksi sebesar 1,1%. Selanjutnya di tahun 2019 produksi perikanan laut mengalami peningkatan sebesar 8,3%.



Gambar 2.1. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

2.4. Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Potensi usaha pengolahan hasil perikanan di Provinsi Kalimantan Timur perikanan sebagai penyedia bahan makanan relatif tinggi. Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa nilai produksi pengolahan hasil perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai produksi pengolahan perikanan air tawar tahun 2020 mencapai Rp. 4.445.848,00, sedangkan pada pengolahan hasil perikanan air laut sebesar Rp. 36.210.150,00.

Tahun 2016 merupakan laju pertumbuhan terendah di perikanan air tawar sebesar 1,5%, sementara itu laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2020 sebesar 2,5%. Laju pertumbuhan perikanan air laut terendah pada pengolahan perikanan air laut sebesar 0,5% di tahun 2020, sedangkan di tahun 2018 laju pertumbuhan tertinggi sebesar 8,93%. Hal ini dikarenakan hasil olahan-olahan perikanan air laut yang banyak variasi dan lebih digemari oleh konsumen.

Rumah tangga perikanan merupakan rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau biota air lainnya dengan tujuan hasil yang diperoleh untuk dijual. Rumah tangga perikanan jumlahnya mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah rumah tangga perikanan dalam waktu 5 tahun berjumlah 303.822. Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah rumah tangga perikanan terbanyak, kemudian Kabupaten Paser memiliki RTP terbanyak selanjutnya.

Tabel 2.5. Rumah Tangga Perikanan (RTP) Lima Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Perikanan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	24324	23978	3829	3466	3467
2	Kubar	12034	12107	7811	7552	8862
3	Kukar	18852	18852	18929	19010	19160
4	Kutim	5173	5173	5213	2437	2247
5	Berau	2846	2906	3213	3285	3455
6	PPU	3818	3818	4776	5282	4054
7	Mahulu	250	100	0	0	148
8	Balikpapan	1224	1214	1093	6118	517
9	Samarinda	0	18747	1201	778	1230
10	Bontang	3174	3181	1412	1912	1594
Kalimantan Timur		71695	90076	47477	49840	44734

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Wilayah Kabupaten Mahulu memiliki RTP terendah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Mahulu memiliki wilayah perairan yang relatif kecil dan mayoritas masyarakat melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2017 rumah tangga perikanan mengalami peningkatan 29% dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan RTP sebesar 19%, selanjutnya di tahun 2019 produksi perikanan laut mengalami peningkatan sebesar 5% dan tahun 2020 turun hingga 10%.

BAB

3

TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN

Nilai Tukar Subsisten (*Subsistence Terms of Trade*) merupakan satu diantara alat ukur yang dapat menilai tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan) berdasarkan aspek pemenuhan kehidupan dasar atau subsisten. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) menjelaskan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar dari usaha perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Nilai tukar susbisten ini memiliki kriteria yaitu jika NTN lebih kecil dari 1 (satu), menunjukkan bahwa keluarga nelayan mempunyai daya beli lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpotensi untuk mengalami defisit anggaran rumah tangganya. Adapun nilai tukar berada di sekitar 1 (satu) memiliki makna bahwa keluarga nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan subsistennya. Selanjutnya jika nilai tukar lebih besar dari 1 (satu), berarti keluarga dari pelaku usaha perikanan ini mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan subsistennya dan juga berpotensi dalam mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, termasuk kemampuan untuk menabung dalam bentuk investasi barang ataupun tabungan di lembaga perbankan

Perkembangan tingkat kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah dapat diketahui dari nilai Indeks Nilai Tukar nya (INTN). Indeks ini merupakan rasio dari indeks total pendapatan keluarga nelayan, pembudidaya atau pengolah terhadap indeks total pengeluaran rumah tangganya selama kurun waktu tertentu. Beberapa asumsi dasar dalam penggunaan konsep NTN dan INTN diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil usaha perikanan tangkap adalah komoditi hasil perikanan maupun hasil olahannya yang berasal dari perairan umum, pesisir dan laut, yang diperdagangkan atau dipertukarkan dengan hasil usaha non perikanan.

- 2) Hasil usaha non perikanan yang diperoleh dari hasil diperdagangkan atau dipertukarkan diasumsikan dipergunakan kembali untuk kebutuhan usaha perikanan, yang meliputi biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan alat dalam suatu proses produksi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini diasumsikan terkait dengan keterbatasan data yang tidak memungkinkan memisahkan barang non perikanan yang benar-benar dipertukarkan dengan bahan pangan.

Dalam studi ini, tingkat kesejahteraan nelayan menggunakan indikator NTN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perairan laut dan perairan umum daratan (PUD), dengan masing-masing jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan.

3.1. Nelayan Perikanan Laut

3.1.1. Alat Tangkap Bagan

Nilai rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan bagan pada usaha perikanan tangkap di Tahun 2021 sebesar Rp. 107,654,400,- atau sebesar Rp. 8.972.500,- perbulannya, sedangkan di Tahun 2022 rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan sebesar Rp. 112,045,500,- atau sebesar Rp. 9.337.125,- perbulannya. Rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,08 persen. Pada usaha non perikanan, rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan di Tahun 2021 sebesar Rp. 18,000,000 atau sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya, dimana rata-rata penerimaan dari usaha non perikanan mengalami peningkatan sebesar 10 persen dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19,800,000,- atau sebesar Rp. 1.650.000,- per bulannya.

Secara keseluruhan rata-rata penerimaan yang diperoleh rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun usaha non perikanan pada Tahun 2021 sebesar Rp.125.654.400,- per tahun atau sebesar Rp.10.471.200,- per bulannya, sedangkan pada rata-rata penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp.131.845.500,- per tahun atau sebesar Rp.10.987.125,- per bulannya. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di Tahun 2022 sebesar 4,93 persen dari tahun sebelumnya.

Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan, dimana untuk usaha perikanan pada Tahun 2021 rata-rata pengeluaran usaha perikanan tangkap bagan sebesar Rp.46.983.840,- atau sebesar Rp.3.915.319,- per bulannya, sementara itu di Tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan bagan Rp.46.301.051,- atau sebesar

Rp.3.858.420,- per bulannya. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran nelayan bagan pada Tahun 2022 sebesar 1,45 persen. Selain itu, pengeluaran pada konsumsi rumah tangga nelayan bagan sebesar Rp.30.648.000,- atau sebesar Rp.2.554.000,- perbulannya, sedangkan pada Tahun 2022 rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan sebesar Rp.33.288.000,- atau sebesar Rp.2.774.000,- perbulannya. Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan untuk usaha perikanan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 8,61 persen.

Tabel 3.1. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Bagan

No.	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	107,654,400	112,045,500
2	Usaha Non Perikanan	18,000,000	19,800,000
	Jumlah	125,654,400	131,845,500
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	46,983,840	46,301,051
2	Konsumsi Rumah Tangga	30,648,000	33,288,000
	Jumlah	77,631,840	79,589,051
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1.62	1.66
2	Penerimaan Perikanan	2.29	2.42
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Penerimaan (%)	100.00	102.35
2	Penerimaan Perikanan (%)	100.00	105.61

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan bagan baik dari usaha perikanan maupun konsumsi rumah tangga pada Tahun 2021 sebesar Rp.77.631.840,- per tahun, sedangkan pada rata-rata pengeluaran di Tahun 2022 sebesar Rp.79.589.051,- per. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran total di Tahun 2022 sebesar 2,52 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Tukar nelayan (NTN) rumah tangga nelayan bagan selama Tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,66 atau berada di atas nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 2,42. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga nelayan bagan sudah mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, selain itu rumah tangga nelayan dapat memenuhi semua kebutuhan atau

pengeluaran untuk usaha perikanannya. Nilai NTN dari total penerimaan rumah tangga nelayan alat tangkap bagan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,13 poin.

Arah pergerakan Nilai Tukar nelayan (NTN) dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dari waktu ke waktu. Indeks NTN Tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 2,35 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan perikanan mengalami meningkat sebesar 5,61 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

3.1.2. Alat Tangkap Rengge Udang

Nilai rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan rengge udang pada usaha perikanan tangkap di Tahun 2021 sebesar Rp. 45,196,800,- atau sebesar Rp. 3.766.400,- per bulannya, sedangkan di Tahun 2022 rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan sebesar Rp. 47,589,600,- atau sebesar Rp. 3.965.800,- per bulannya. Rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,29 persen. Pada usaha non perikanan, rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan di Tahun 2021 sebesar Rp. 9,600,000 atau sebesar Rp. 800.000,- per bulannya, dimana rata-rata penerimaan dari usaha non perikanan mengalami peningkatan sebesar 3,12 persen dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 9,900,000,- atau sebesar Rp. 825.000,- per bulannya.

Secara keseluruhan rata-rata penerimaan yang diperoleh rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun usaha non perikanan pada Tahun 2021 sebesar Rp.54.796.800,- per tahun atau sebesar Rp.4.566.400,- per bulannya, sedangkan pada rata-rata penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp.57.489.600,- per tahun atau sebesar Rp.4.790.800,- per bulannya. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di Tahun 2022 sebesar 4,91 persen dari tahun sebelumnya.

Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan, dimana untuk usaha perikanan pada Tahun 2021 rata-rata pengeluaran usaha perikanan tangkap rengge udang sebesar Rp.19.884.599,- atau sebesar Rp.1.657.049,- per bulannya, sementara itu di

Tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan rengge udang Rp.20.686.272,- atau sebesar Rp.1.723.856,- per bulannya. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran nelayan bagan pada Tahun 2022 sebesar 4,03 persen. Selain itu, pengeluaran pada konsumsi rumah tangga nelayan rengge udang sebesar Rp.25.992.000,- atau sebesar Rp.2.166.000,- perbulannya, sedangkan pada Tahun 2022 rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan sebesar Rp.26.400.000,- atau sebesar Rp.2.200.000,- perbulannya. Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan untuk usaha perikanan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,57 persen.

Tabel 3.2. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Rengge Udang

No.	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	45,196,800	47,589,600
2	Usaha Non Perikanan	9,600,000	9,900,000
	Jumlah	54,796,800	57,489,600
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	19,884,599	20,686,272
2	Konsumsi Rumah Tangga	25,992,000	26,400,000
	Jumlah	45,876,599	47,086,272
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1.19	1.22
2	Penerimaan Perikanan	2.27	2.30
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Penerimaan (%)	100.00	102.22
2	Penerimaan Perikanan (%)	100.00	102.59

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan rengge udang baik dari usaha perikanan maupun konsumsi rumah tangga pada Tahun 2021 sebesar Rp.45.876.599,- per tahun, sedangkan pada rata-rata pengeluaran di Tahun 2022 sebesar Rp.47.086.272,- per. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran total di Tahun 2022 sebesar 2,64 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Tukar nelayan (NTN) rumah tangga nelayan rengge udang selama Tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,22 atau berada di atas nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 2,30. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga nelayan rengge udang sudah

mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, selain itu rumah tangga nelayan dapat memenuhi semua kebutuhan atau pengeluaran untuk usaha perikananannya. Nilai NTN dari total penerimaan rumah tangga nelayan alat tangkap bagan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin.

Arah pergerakan Nilai Tukar nelayan (NTN) dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dari waktu ke waktu. Indeks NTN Tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 2,22 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 2,59 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

3.1.3. Alat Tangkap Rengge Ikan

Nilai rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan rengge ikan pada usaha perikanan tangkap di Tahun 2021 sebesar Rp. 49,718,400,- atau sebesar Rp. 4.143.200,- per bulannya, sedangkan di Tahun 2022 rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan sebesar Rp. 50,138,000,- atau sebesar Rp. 4.178.200,- per bulannya. Rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen. Pada usaha non perikanan, rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan di Tahun 2021 sebesar Rp. 1,800,000 atau sebesar Rp. 150.000,- per bulannya, dimana rata-rata penerimaan dari usaha non perikanan mengalami peningkatan sebesar 20 persen dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2,160,000,- atau sebesar Rp. 180.000,- per bulannya.

Secara keseluruhan rata-rata penerimaan yang diperoleh rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun usaha non perikanan pada Tahun 2021 sebesar Rp.51.518.400,- per tahun atau sebesar Rp.4.293.200,- per bulannya, sedangkan pada rata-rata penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp.52.298.400,- per tahun atau sebesar Rp.4.358.200,- per bulannya. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di Tahun 2022 sebesar 1,51 persen dari tahun sebelumnya.

Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan, dimana untuk usaha perikanan pada Tahun 2021 rata-rata pengeluaran usaha perikanan tangkap rengge ikan sebesar Rp.23.621.000,- atau sebesar Rp.1.968.416,- per bulannya, sementara itu di Tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan bagan Rp.22.844.033,- atau sebesar Rp.1.903.669,- per bulannya. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran nelayan rengge ikan pada Tahun 2022 sebesar 3,29 persen. Selain itu, pengeluaran pada konsumsi rumah tangga nelayan rengge ikan sebesar Rp.24.840.000,- atau sebesar Rp.2.070.000,- perbulannya, sedangkan pada Tahun 2022 rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan sebesar Rp.26.172.000,- atau sebesar Rp.2.181.000,- perbulannya. Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan untuk usaha perikanan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,36 persen.

Tabel 3.3. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Rengge Ikan

No.	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	49,718,400	50,138,400
2	Usaha Non Perikanan	1,800,000	2,160,000
	Jumlah	51,518,400	52,298,400
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	23,621,000	22,844,033
2	Konsumsi Rumah Tangga	24,840,000	26,172,000
	Jumlah	48,461,000	49,016,033
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1.06	1.07
2	Penerimaan Perikanan	2.10	2.19
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Penerimaan (%)	100.00	100.36
2	Penerimaan Perikanan (%)	100.00	104.27

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan bagan baik dari usaha perikanan maupun konsumsi rumah tangga pada Tahun 2021 sebesar Rp.48.461.000,- per tahun, sedangkan pada rata-rata pengeluaran di Tahun 2022 sebesar Rp.49.016.033,- per. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran total di Tahun 2022 sebesar 1,15 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Tukar nelayan (NTN) rumah tangga nelayan rengge ikan selama Tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,07 atau berada di atas nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 2,19. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga nelayan bagan sudah mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, selain itu rumah tangga nelayan dapat memenuhi semua kebutuhan atau pengeluaran untuk usaha perikanannya. Nilai NTN dari total penerimaan rumah tangga nelayan alat tangkap rengge ikan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin.

Arah pergerakan Nilai Tukar nelayan (NTN) dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dari waktu ke waktu. Indeks NTN Tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 0,36 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 4,27 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

3.2. Nelayan Perikanan Perairan Umum Daratan

3.2.1. Alat Tangkap Rengge

Pada usaha perikanan tangkap dengan alat tangkap rengge, rata-rata penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp 63.792.000,00 per tahun atau Rp 5.316.000,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata penerimaan nelayan rengge sebesar Rp 66.366.000,00 per tahun atau Rp 5.530.500,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan pada usaha perikanan di tahun 2022 sebesar 4,03% dari tahun sebelumnya. Selain itu, nelayan rengge juga memiliki usaha non perikanan dengan rata-rata penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp 9.480.000,00 per tahun atau Rp 790.000,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata penerimaan pada usaha non perikanan sebesar Rp. 10.980.000,00 per tahun atau Rp 915.000. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan pada usaha non perikanan di tahun 2022 sebesar 15,82% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan rata-rata

penerimaan yang diperoleh nelayan rengge baik dari usaha perikanan dan usaha non perikanan pada tahun 2021 sebesar Rp 73.272.000,00 per tahun atau Rp 6.106.000 per bulan, sedangkan pada rata-rata penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 77.346.000,00 per tahun atau Rp 6.445.500. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di tahun 2022 sebesar 5,56% dari tahun sebelumnya.

Pada usaha perikanan, rata-rata pengeluaran nelayan rengge pada tahun 2021 sebesar Rp 24.827.100,00 per tahun atau Rp 2.068.925 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan rengge sebesar Rp 25.170.252,00 per tahun atau Rp 2.097.521,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran pada usaha perikanan di tahun 2021 sebesar 1,38% dari tahun sebelumnya. Selain itu, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan rengge pada tahun 2021 sebesar Rp 42.684.000,00 per tahun Rp 3.557.000,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan rengge sebesar Rp 45.132.000,00 per tahun Rp 3.761.000,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan rengge di tahun 2022 sebesar 5,74% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga nelayan alat tangkap rengge baik dari pengeluaran usaha perikanan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 sebesar Rp 67.511.100,00 per tahun Rp 5.625.925,00 per bulan, sedangkan pada rata-rata pengeluaran tahun 2022 sebesar Rp 70.302.252,00 per tahun Rp 5.828.521 per bulan. Terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran total di tahun 2022 sebesar 4,13% dari tahun sebelumnya.

NTN dengan menggunakan alat tangkap rengge selama tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,10 atau berada disekitar nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 2,64. Hal ini menunjukkan kemampuan rumah tangga nelayan alat tangkap rengge dalam memenuhi kebutuhan hidup masih bersifat subsisten, meskipun kebutuhan untuk usaha perikanan dapat dipenuhi. Dibandingkan dengan NTN pada tahun 2021, NTN dari total penerimaan rumah tangga nelayan alat tangkap rengge pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan juga mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin.

Tabel 3.4. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Alat Tangkap Rengge

No.	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	63.792.000	66.366.000
2	Usaha Non Perikanan	9.480.000	10.980.000
	Jumlah	73.272.000	77.346.000
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	24.827.100	25.170.252
2	Konsumsi Rumah Tangga	42.684.000	45.132.000
	Jumlah	67.511.100	70.302.252
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1,09	1,10
2	Penerimaan Perikanan	2,57	2,64
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Penerimaan	100,00	101,37
2	Penerimaan Perikanan	100,00	102,62

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Arah pergerakan NTN dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan alat tangkap rengge dari waktu ke waktu. Indeks NTN tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 1,37 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan alat tangkap rengge mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 2,62 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan alat tangkap rengge dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

3.2.2. Alat Tangkap Pengilar

Pada usaha perikanan tangkap dengan alat tangkap pengilar, rata-rata penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp 58.248.000,00 per tahun atau Rp 4.854.000,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata penerimaan nelayan pengilar sebesar Rp 58.901.400,00 per tahun atau Rp 4.908.000,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan pada usaha perikanan di tahun 2022 sebesar 1,12% dari tahun sebelumnya. Selain itu, nelayan pengilar juga memiliki usaha non perikanan dengan rata-rata penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp 9.360.000,00

per tahun atau Rp 780.000,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata penerimaan pada usaha non perikanan sebesar Rp 11.640.000,00 per tahun atau Rp 970.000,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan pada usaha non perikanan di tahun 2022 sebesar 24,36% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan rata-rata penerimaan yang diperoleh nelayan pengilang baik dari usaha perikanan dan usaha non perikanan pada tahun 2021 sebesar Rp 67.608.000,00 per tahun atau Rp 5.634.000,00 per bulan, sedangkan pada rata-rata penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 70.541.400,00 per tahun atau Rp 5.878.450,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di tahun 2022 sebesar 4,34% dari tahun sebelumnya.

Pada usaha perikanan, rata-rata pengeluaran nelayan pengilang pada tahun 2021 sebesar Rp 23.299.000,00 per tahun atau Rp 1.941.583,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan pengilang sebesar Rp 22.011.500,00 per tahun atau Rp 1.834.292,00 per bulan. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran pada usaha perikanan di tahun 2021 sebesar 5,53% dari tahun sebelumnya. Selain itu, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan pengilang pada tahun 2021 sebesar Rp 34.326.000,00 per tahun atau Rp 2.860.500,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan pengilang sebesar Rp 36.420.000,00 per tahun atau Rp 3.035.000,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan pengilang di tahun 2022 sebesar 6,10% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga nelayan alat tangkap pengilang baik dari pengeluaran usaha perikanan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 sebesar Rp 57.625.000,00 per tahun atau Rp 4.802.083,00 per bulan, sedangkan pada rata-rata pengeluaran tahun 2022 sebesar Rp 58.431.500,00 per tahun atau Rp 4.869.292,00 per bulan. Terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran total di tahun 2022 sebesar 1,40% dari tahun sebelumnya.

NTN dengan menggunakan alat tangkap pengilang selama tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,21 atau berada disekitar nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 2,68. Hal ini menunjukkan kemampuan rumah tangga nelayan alat tangkap pengilang dalam memenuhi kebutuhan hidup masih bersifat subsisten, meskipun kebutuhan untuk usaha perikanan dapat dipenuhi. Dibandingkan dengan NTN pada tahun 2021, NTN dari total penerimaan

rumah tangga nelayan alat tangkap pengilar pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan juga mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin.

Tabel 3.5. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Alat Tangkap Pengilar

No.	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	58.248.000	58.901.400
2	Usaha Non Perikanan	9.360.000	11.640.000
	Jumlah	67.608.000	70.541.400
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	23.299.000	22.011.500
2	Konsumsi Rumah Tangga	34.326.000	36.420.000
	Jumlah	57.625.000	58.431.500
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1,17	1,21
2	Penerimaan Perikanan	2,50	2,68
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Penerimaan	100,00	102,90
2	Penerimaan Perikanan	100,00	107,04

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Arah pergerakan NTN dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan alat tangkap pengilar dari waktu ke waktu. Indeks NTN tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 2,9 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan alat tangkap pengilar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 7,04 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan alat tangkap pengilar dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

3.2.3. Alat Tangkap Lukah

Pada usaha perikanan tangkap dengan alat tangkap lukah, rata-rata penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp 66.384.000,00 per tahun atau Rp 5.532.000,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata penerimaan nelayan

lukah sebesar Rp 67.860.000,00 per tahun atau Rp 5.655.000,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan pada usaha perikanan di tahun 2022 sebesar 2,22% dari tahun sebelumnya. Selain itu, nelayan lukah juga memiliki usaha non perikanan dengan rata-rata penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp 3.600.000,00 per tahun atau Rp 300.000,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata penerimaan pada usaha non perikanan sebesar Rp 6.300.000,00 per tahun atau Rp 525.000,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan pada usaha non perikanan di tahun 2022 sebesar 75% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan rata-rata penerimaan yang diperoleh nelayan lukah baik dari usaha perikanan dan usaha non perikanan pada tahun 2021 sebesar Rp 69.984.000,00 per tahun atau Rp 5.832.000,00 per bulan, sedangkan pada rata-rata penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 74.160.000,00 per tahun atau Rp 6.180.000,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di tahun 2022 sebesar 5,97% dari tahun sebelumnya.

Pada usaha perikanan, rata-rata pengeluaran nelayan lukah pada tahun 2021 sebesar Rp 25.460.667,00 per tahun Rp 2.121.722,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan lukah sebesar Rp 22.426.833,00 per tahun atau Rp 1.868.103,00 per bulan. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran pada usaha perikanan di tahun 2021 sebesar 11,92% dari tahun sebelumnya. Selain itu, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan lukah pada tahun 2021 sebesar Rp 40.756.000,00 per tahun atau Rp 3.396.333,00 per bulan, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan lukah sebesar Rp 42.056.000,00 per tahun atau Rp 3.504.667,00 per bulan. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan lukah di tahun 2022 sebesar 3,19% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga nelayan alat tangkap lukah baik dari pengeluaran usaha perikanan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 sebesar Rp 66.216.667,00 per tahun atau Rp 5.518.056,00 per bulan, sedangkan pada rata-rata pengeluaran tahun 2022 sebesar Rp 64.482.833,00 per tahun atau Rp 5.373.569,00 per bulan. Terdapat penurunan rata-rata pengeluaran total di tahun 2022 sebesar 2,62% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.6. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Alat Tangkap Lukah

No.	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	66.384.000	67.860.000
2	Usaha Non Perikanan	3.600.000	6.300.000
	Jumlah	69.984.000	74.160.000
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan (Rp)		
1	Usaha Perikanan	25.460.667	22.426.833
2	Konsumsi Rumah Tangga	40.756.000	42.056.000
	Jumlah	66.216.667	64.482.833
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1,06	1,15
2	Penerimaan Perikanan	2,61	3,03
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Penerimaan	100,00	108,82
2	Penerimaan Perikanan	100,00	116,05

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

NTN dengan menggunakan alat tangkap lukah selama tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,15 atau berada disekitar nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 3,03. Hal ini menunjukkan kemampuan rumah tangga nelayan alat tangkap lukah dalam memenuhi kebutuhan hidup masih bersifat subsisten, meskipun kebutuhan untuk usaha perikanan dapat dipenuhi. Dibandingkan dengan NTN pada tahun 2021, NTN dari total penerimaan rumah tangga nelayan alat tangkap lukah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan juga mengalami peningkatan sebesar 0,42 poin.

Arah pergerakan NTN dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan alat tangkap lukah dari waktu ke waktu. Indeks NTN tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 8,82 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan alat tangkap lukah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 16,05 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan alat tangkap lukah dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

BAB

4

TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

4.1. Tingkat Kesejahteraan Nelayan

Nilai Tukar Subsisten (*Subsistence Terms of Trade*) merupakan satu diantara alat ukur yang dapat menilai tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan) berdasarkan aspek pemenuhan kehidupan dasar atau subsisten. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) menjelaskan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar dari usaha perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Nilai tukar subsisten ini memiliki kriteria yaitu jika NTN lebih kecil dari 1 (satu), menunjukkan bahwa keluarga nelayan mempunyai daya beli lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpotensi untuk mengalami defisit anggaran rumah tangganya. Adapun nilai tukar berada di sekitar 1 (satu) memiliki makna bahwa keluarga nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan subsistennya. Selanjutnya jika nilai tukar lebih besar dari 1 (satu), berarti keluarga dari pelaku usaha perikanan ini mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan subsistennya dan juga berpotensi dalam mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, termasuk kemampuan untuk menabung dalam bentuk investasi barang ataupun tabungan di lembaga perbankan

Perkembangan tingkat kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah dapat diketahui dari nilai Indeks Nilai Tukar nya (INTN). Indeks ini merupakan rasio dari indeks total pendapatan keluarga nelayan, pembudidaya atau pengolah terhadap indeks total pengeluaran rumah tangganya selama kurun waktu tertentu. Beberapa asumsi dasar dalam penggunaan konsep NTN dan INTN diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil usaha perikanan tangkap adalah komoditi hasil perikanan maupun hasil olahannya yang berasal dari perairan umum, pesisir dan laut, yang diperdagangkan atau dipertukarkan dengan hasil usaha non perikanan.

- 2) Hasil usaha non perikanan yang diperoleh dari hasil diperdagangkan atau dipertukarkan diasumsikan dipergunakan kembali untuk kebutuhan usaha perikanan, yang meliputi biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan alat dalam suatu proses produksi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini diasumsikan terkait dengan keterbatasan data yang tidak memungkinkan memisahkan barang non perikanan yang benar-benar dipertukarkan dengan bahan pangan.
- 3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi tentang data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. Nelayan penerima bantuan sosial dalam hal ini berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK). Bantuan tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga.

Dalam studi ini, tingkat kesejahteraan nelayan menggunakan indikator NTN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perairan laut dan perairan umum daratan (PUD), dengan masing-masing jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan.

4.1.1. Tingkat Kesejahteraan Nelayan Secara Umum

Nilai rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan pada usaha perikanan tangkap di Tahun 2021 sebesar Rp. 51,285,120,- atau sebesar Rp. 4.273.760,- perbulannya, sedangkan di Tahun 2022 rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan sebesar Rp. 51,364,800,- atau sebesar Rp. 4.280.400,- perbulannya. Rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen. Pada usaha non perikanan, rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan di Tahun 2021 sebesar Rp. 12,200,000 atau sebesar Rp. 1.016.667,- per bulannya, dimana rata-rata penerimaan dari usaha non perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,82 persen dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 12,300,000,- atau sebesar Rp. 1.025.000,- per bulannya.

Secara keseluruhan rata-rata penerimaan yang diperoleh rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun usaha non perikanan pada Tahun 2021 sebesar Rp.63.485.120,- per tahun atau sebesar Rp.5.290.427,- per bulannya, sedangkan pada rata-rata penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp.63.664.800,- per tahun atau sebesar Rp.5.305.400,- per bulannya. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di Tahun 2022 sebesar 0,28 persen dari tahun sebelumnya.

Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan, dimana untuk usaha perikanan pada Tahun 2021 rata-rata pengeluaran usaha perikanan tangkap sebesar Rp.32.534.867,- atau sebesar Rp.2.711.239,- per bulannya, sementara itu di Tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan Rp.32.147.000,- atau sebesar Rp.2.678.917,- per bulannya. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran nelayan pada Tahun 2022 sebesar 1,19 persen. Selain itu, pengeluaran pada konsumsi rumah tangga nelayan sebesar Rp.28.668.000,- atau sebesar Rp.2.389.000,- perbulannya, sedangkan pada Tahun 2022 rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan sebesar Rp.16.860.000,- atau sebesar Rp.1.405.000,- perbulannya. Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan untuk usaha perikanan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 41,19 persen. Hal ini dikarenakan nelayan mendapatkan bantuan sosial.

Tabel 4.1. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Penerima Program Sosial

No	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan		
1	Usaha Perikanan (Rp)	51,285,120	51,364,800
2	Usaha Non Perikanan (Rp)	12,200,000	12,300,000
	Jumlah	63,485,120	63,664,800
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan		
1	Usaha Perikanan (Rp)	32,534,867	32,147,000
2	Konsumsi Rumah Tangga (Rp)	28,668,000	16,860,000
	Jumlah	61,202,867	49,007,000
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1.04	1.30
2	Penerimaan Perikanan	1.58	1.60
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Pendapatan (%)	100.00	125.24
2	Penerimaan Perikanan (%)	100.00	101.36

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun konsumsi rumah tangga pada Tahun 2021 sebesar Rp.61.202.867,- per tahun, sedangkan pada rata-rata pengeluaran di Tahun 2022 sebesar Rp.49.007.000,- per. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran total di Tahun 2022 sebesar 19,93 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Tukar nelayan (NTN) rumah tangga nelayan selama Tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,30 atau berada di atas nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 1,60. Hal ini menunjukkan bahwa

secara umum rumah tangga nelayan sudah mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, selain itu rumah tangga nelayan dapat memenuhi semua kebutuhan atau pengeluaran untuk usaha perikananannya. Nilai NTN dari total penerimaan rumah tangga nelayan alat tangkap pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,26 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin.

Arah pergerakan Nilai Tukar nelayan (NTN) dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dari waktu ke waktu. Indeks NTN Tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 25,24 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 1,36 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

Dari hasil analisis tingkat kesejahteraan yang menggunakan indikator Nilai Tukar nelayan (NTN) menunjukkan bahwa penerima Program Bantuan Sosial (DTKS) secara umum terlihat kondisi kesejahteraan awal sebelum menerima bantuan sudah mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya atau tidak berada dalam kategori miskin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai NTN total penerimaan dan penerimaan perikanan di tahun 2021 sebesar 1,04 dan 1,58. Pada sisi lain, Program Bantuan Sosial (DTKS) mampu berkontribusi dalam peningkatan daya beli rumah tangga dan kebutuhan usaha perikanan yang ditunjukkan dari nilai INTN yang meningkat ditahun 2022 yaitu sebesar 125,24 untuk nilai INTN total penerimaan dan sebesar 101,36 untuk nilai INTN penerimaan perikanan.

4.1.2. Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir/Perikanan Laut

Nilai rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan pada usaha perikanan tangkap di Tahun 2021 sebesar Rp. 53,034,240,- atau sebesar Rp. 4.419.520,- perbulannya, sedangkan di Tahun 2022 rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan sebesar Rp. 53,956,800,- atau sebesar Rp. 4.496.400,- perbulannya. Rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,74 persen. Pada usaha non perikanan, rata-rata

penerimaan rumah tangga nelayan di Tahun 2021 sebesar Rp. 9,600,000 atau sebesar Rp. 800.000,- per bulannya, dimana rata-rata penerimaan dari usaha non perikanan mengalami peningkatan sebesar 3,12 persen dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 9,900,000,- atau sebesar Rp. 825.000,- per bulannya.

Secara keseluruhan rata-rata penerimaan yang diperoleh rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun usaha non perikanan pada Tahun 2021 sebesar Rp.62.634.240,- per tahun atau sebesar Rp.5.219.520,- per bulannya, sedangkan pada rata-rata penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp.63.856.800,- per tahun atau sebesar Rp.5.321.400,- per bulannya. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di Tahun 2022 sebesar 1,95 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.2. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Pesisir Penerima Program Sosial

No	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan		
1	Usaha Perikanan (Rp)	53,034,240	53,956,800
2	Usaha Non Perikanan (Rp)	9,600,000	9,900,000
	Jumlah	62,634,240	63,856,800
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan		
1	Usaha Perikanan (Rp)	32,534,867	32,147,000
2	Konsumsi Rumah Tangga (Rp)	28,320,000	16,848,000
	Jumlah	60,854,867	48,995,000
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1.03	1.30
2	Penerimaan Perikanan	1.63	1.68
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Pendapatan (%)	100.00	126.63
2	Penerimaan Perikanan (%)	100.00	102.97

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan, dimana untuk usaha perikanan pada Tahun 2021 rata-rata pengeluaran usaha perikanan tangkap sebesar Rp.32.534.867,- atau sebesar Rp.2.711.239,- per bulannya, sementara itu di Tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan Rp.32.147.000,- atau sebesar Rp.2.678.917,- per bulannya. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran nelayan pada Tahun 2022 sebesar 1,19 persen. Selain itu, pengeluaran pada konsumsi rumah tangga nelayan sebesar Rp.28.320.000,- atau sebesar Rp.2.360.000,- perbulannya, sedangkan pada Tahun 2022 rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan sebesar Rp.16.848.000,- atau sebesar Rp.1.404.000,- perbulannya. Rata-rata pengeluaran rumah tangga

nelayan untuk usaha perikanan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 40,51 persen. Hal ini dikarenakan nelayan mendapatkan bantuan sosial.

Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun konsumsi rumah tangga pada Tahun 2021 sebesar Rp.60.854.867,- per tahun, sedangkan pada rata-rata pengeluaran di Tahun 2022 sebesar Rp.48.995.000,- per. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran total di Tahun 2022 sebesar 19,49 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Tukar nelayan (NTN) rumah tangga nelayan selama Tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,30 atau berada di atas nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 1,68. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga nelayan sudah mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, selain itu rumah tangga nelayan dapat memenuhi semua kebutuhan atau pengeluaran untuk usaha perikanan. Nilai NTN dari total penerimaan rumah tangga nelayan alat tangkap pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,27 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin.

Arah pergerakan Nilai Tukar nelayan (NTN) dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dari waktu ke waktu. Indeks NTN Tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 26,63 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan perikanan mengalami meningkat sebesar 2,97 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

Dari hasil analisis tingkat kesejahteraan yang menggunakan indikator Nilai Tukar nelayan (NTN) menunjukkan bahwa penerima Program Bantuan Sosial (DTKS) pada rumah tangga nelayan pesisir/perikanan laut terlihat kondisi kesejahteraan awal sebelum menerima bantuan sudah mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya atau tidak berada dalam kategori miskin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai NTN total penerimaan dan penerimaan perikanan di tahun 2021 sebesar 1,03 dan 1,63. Pada sisi lain, Program Bantuan Sosial (DTKS) mampu berkontribusi dalam peningkatan daya beli rumah

tangga dan kebutuhan usaha perikanan yang ditunjukkan dari nilai INTN yang meningkat ditahun 2022 yaitu sebesar 126,63 untuk nilai INTN total penerimaan dan sebesar 102,97 untuk nilai INTN penerimaan perikanan.

4.1.3. Tingkat Kesejahteraan Nelayan Perairan Umum Daratan (PUD)

Nilai rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan pada usaha perikanan tangkap di Tahun 2021 sebesar Rp. 40,320,000,- atau sebesar Rp. 3.360.000,- perbulannya, sedangkan di Tahun 2022 rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan sebesar Rp. 41,256,000,- atau sebesar Rp. 3.438.000,- perbulannya. Rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,32 persen. Pada usaha non perikanan, rata-rata penerimaan rumah tangga nelayan di Tahun 2021 sebesar Rp. 13,500,000 atau sebesar Rp. 1.125.000,- per bulannya, sedangkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 13,500,000,- atau sebesar Rp. 1.125.000,- per bulannya.

Secara keseluruhan rata-rata penerimaan yang diperoleh rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun usaha non perikanan pada Tahun 2021 sebesar Rp.53.820.000,- per tahun atau sebesar Rp.4.485.000,- per bulannya, sedangkan pada rata-rata penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp.54.756.000,- per tahun atau sebesar Rp.4.563.000,- per bulannya. Terjadi peningkatan rata-rata penerimaan total di Tahun 2022 sebesar 1,74 persen dari tahun sebelumnya.

Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan, dimana untuk usaha perikanan pada Tahun 2021 rata-rata pengeluaran usaha perikanan tangkap sebesar Rp.25.198.800,- atau sebesar Rp.2.099.900,- per bulannya, sementara itu di Tahun 2022 rata-rata pengeluaran nelayan Rp.24.931.829,- atau sebesar Rp.2.077.652,- per bulannya. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran nelayan pada Tahun 2022 sebesar 1,06 persen. Selain itu, pengeluaran pada konsumsi rumah tangga nelayan sebesar Rp.27.336.000,- atau sebesar Rp.2.278.000,- perbulannya, sedangkan pada Tahun 2022 rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan sebesar Rp.18.360.000,- atau sebesar Rp.1.530.000,- perbulannya. Rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan untuk usaha perikanan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 32,84 persen. Hal ini dikarenakan nelayan mendapatkan bantuan sosial.

Tabel 4.3. Nilai NTN dan INTN Rumah Tangga Nelayan Perairan Umum Daratan Penerima Program Sosial

No.	Kategori	Tahun	
		2021	2022
A	Rata-rata Penerimaan Rumah Tangga Nelayan		
1	Usaha Perikanan (Rp)	40,320,000	41,256,000
2	Usaha Non Perikanan (Rp)	13,500,000	13,500,000
	Jumlah	53,820,000	54,756,000
B	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan		
1	Usaha Perikanan (Rp)	25,198,800	24,931,829
2	Konsumsi Rumah Tangga (Rp)	27,336,000	18,360,000
	Jumlah	52,534,800	43,291,829
C	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
1	Total Penerimaan	1.02	1.26
2	Penerimaan Perikanan	1.60	1.65
D	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN)		
1	Total Pendapatan (%)	100.00	123.46
2	Penerimaan Perikanan (%)	100.00	103.42

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan baik dari usaha perikanan maupun konsumsi rumah tangga pada Tahun 2021 sebesar Rp.52.534.800,- per tahun, sedangkan pada rata-rata pengeluaran di Tahun 2022 sebesar Rp.43.291.829,- per. Terjadi penurunan rata-rata pengeluaran total di Tahun 2022 sebesar 17,59 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai Tukar nelayan (NTN) rumah tangga nelayan selama Tahun 2022 dari total penerimaan bernilai sebesar 1,26 atau berada di atas nilai satu, sedangkan pada NTN dari penerimaan perikanan memiliki nilai sebesar 1,65. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga nelayan sudah mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, selain itu rumah tangga nelayan dapat memenuhi semua kebutuhan atau pengeluaran untuk usaha perikananannya. Nilai NTN dari total penerimaan rumah tangga nelayan alat tangkap pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin, sedangkan pada penerimaan perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin.

Arah pergerakan Nilai Tukar nelayan (NTN) dapat dilihat dari Indeks Nilai Tukar nelayan (INTN), dimana Indeks NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dari waktu ke waktu. Indeks NTN Tahun 2022 berdasarkan total penerimaan cenderung meningkat sebesar 23,46 poin yang mengindikasikan bahwa daya beli rumah tangga nelayan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021, sedangkan nilai indeks NTN berdasarkan penerimaan

perikanan mengalami meningkat sebesar 3,42 poin yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan atau pengeluaran dari usaha perikanan.

Dari hasil analisis tingkat kesejahteraan yang menggunakan indikator Nilai Tukar nelayan (NTN) menunjukkan bahwa penerima Program Bantuan Sosial (DTKS) pada rumah tangga nelayan perairan umum daratan (PUD) terlihat kondisi kesejahteraan awal sebelum menerima bantuan sudah mampu memenuhi kebutuhan subsistennya dan mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya atau tidak berada dalam kategori miskin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai NTN total penerimaan dan penerimaan perikanan di tahun 2021 sebesar 1,02 dan 1,60. Pada sisi lain, Program Bantuan Sosial (DTKS) mampu berkontribusi dalam peningkatan daya beli rumah tangga dan kebutuhan usaha perikanan yang ditunjukkan dari nilai INTN yang meningkat di tahun 2022 yaitu sebesar 146,63 untuk nilai INTN total penerimaan dan sebesar 103,42 untuk nilai INTN penerimaan perikanan.

BAB

5

ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL KERAGAAN USAHA PERIKANAN

Analisis kelayakan finansial berdasarkan kriteria investasi dilakukan untuk mengetahui jumlah biaya, manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dimasa mendatang berdasarkan nilai sekarang dengan menggunakan faktor tingkat suku bunga. Analisis kelayakan finansial berdasarkan kriteria investasi ini dilakukan pada usaha perikanan baik perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan di wilayah sentra produksi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Kriteria-kriteria investasi yang dianalisis meliputi *net present value* (NPV), *internal rate of return* (IRR) dan *net benefit-cost ratio* (Net BCR). Beberapa asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

- a) Data yang digunakan dalam analisis usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan, yang meliputi *benefit* dan *cost*, bersumber dari data primer yang berkaitan erat dengan usaha masyarakat dan disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana kegiatan berlangsung.
- b) Umur proyek usaha ditetapkan selama lima tahun.
- c) Jumlah produksi, biaya dan harga jual rata-rata bersifat konstan selama masa analisis, yaitu lima tahun.
- d) Penerimaan kas berasal dari hasil penjualan produksi usaha perikanan per tahun, nilai penyusutan dan nilai residu yang terjadi pada tahun-tahun tertentu, dimana masa pakai peralatan investasi telah berakhir.
- e) Tingkat diskonto (*discount rate*) atau OCC yang digunakan adalah tingkat suku bunga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan atau yaitu sebesar 15 %.

5.1. Keragaan Investasi Usaha Masyarakat Pesisir/Perikanan Laut

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir/perikanan laut menunjukkan keragaan sebagai berikut :

Tabel 5.1. Kriteria Investasi Usaha Perikanan Laut

No	Usaha Perikanan	Kriteria Investasi			Keuntungan (Rp/bln)	Keterangan
		NPV (Rp)	IRR (%)	Net BCR		
1	Bagan	178.693.549	79	4,17	6.916.708	Layak
2	Rengge Udang	51.135.134	67	3,61	2.164.300	Layak
3	Rengge Ikan	46.498.995	70	3,76	1.915.608	Layak
4	Pengolahan Kerupuk	72.232.228	112	5,68	2.434.288	Layak
5	Pengolahan Amplang	48.193.590	92	4,75	1.744.875	Layak
6	Pengolahan Ikan Asin	15.276.751	94	4,59	559.176	Layak
7	Pengolahan Bandeng Cabut Duri	61.905.803	111	5,40	2.098.917	Layak

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

5.1.1. Keragaan Usaha Perikanan : Alat Tangkap Bagan

a) *Net Present Value* (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan dengan alat tangkap bagan sebesar Rp. 178.693.549 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan dengan alat tangkap bagan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 178.693.549 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan dengan alat tangkap bagan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai $NPV > 0$.

b) *Internal rate of Return* (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria $IRR > OCC$. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan dengan alat tangkap bagan menghasilkan nilai IRR sebesar 79% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan dengan alat tangkap bagan akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 79% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) *Net Benefit Cost Ratio* (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan dengan alat tangkap bagan dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 4,17. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan dengan alat tangkap bagan mampu memberikan *net benefit* sebesar 4,17 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar 4,17 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.1.2. Keragaan Usaha Perikanan : Alat Tangkap Rengge Udang

a) *Net Present Value* (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge udang sebesar Rp. 51.135.134 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan dengan alat tangkap rengge udang untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 51.135.134 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan dengan alat tangkap rengge udang layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) *Internal rate of Return* (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge udang menghasilkan nilai IRR sebesar 67% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge udang akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 67% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) *Net Benefit Cost Ratio* (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan dengan alat tangkap rengge udang dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 3,61. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan dengan alat tangkap rengge udang mampu memberikan *net benefit* sebesar 3,61 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar 3,61 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.1.3. Keragaan Usaha Perikanan : Alat Tangkap Rengge Ikan

a) *Net Present Value* (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge ikan sebesar Rp. 46.498.995 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan dengan alat tangkap rengge ikan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 46.498.995 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan dengan alat tangkap rengge ikan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) *Internal rate of Return* (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge ikan menghasilkan nilai IRR sebesar 70% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge ikan akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 70% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) *Net Benefit Cost Ratio* (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan dengan alat tangkap rengge ikan dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 3,76. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan dengan alat tangkap rengge ikan mampu memberikan *net benefit* sebesar 3,76 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar 3,76 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.1.4. Keragaan Usaha Perikanan : Pengolahan Kerupuk

a) *Net Present Value* (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan pengolahan kerupuk sebesar Rp. 72.232.228 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan pengolahan kerupuk untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 72.232.228 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan pengolahan kerupuk layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) *Internal rate of Return* (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan pengolahan kerupuk menghasilkan nilai IRR sebesar 112% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan pengolahan kerupuk akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 112% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) *Net Benefit Cost Ratio* (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan pengolahan kerupuk dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 5,68. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan pengolahan kerupuk mampu memberikan *net benefit* sebesar 5,68 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar 5,68 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.1.5. Keragaan Usaha Perikanan : Pengolahan Amplang

a) *Net Present Value* (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan pengolahan amplang sebesar Rp. 48.193.590 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan pengolahan amplang untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 48.193.590 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan pengolahan amplang layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) *Internal rate of Return* (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan pengolahan amplang menghasilkan nilai IRR sebesar 92% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan pengolahan amplang akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 92% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) *Net Benefit Cost Ratio* (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan

setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan pengolahan amplang dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 4,75. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan pengolahan amplang mampu memberikan *net benefit* sebesar 4,75 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar 4,75 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.1.6. Keragaan Usaha Perikanan : Pengolahan Ikan Asin

a) *Net Present Value* (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan pengolahan ikan asin sebesar Rp. 15.276.751 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan pengolahan ikan asin untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 15.276.751 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan pengolahan ikan asin layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) *Internal rate of Return* (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan pengolahan ikan asin menghasilkan nilai IRR sebesar 94% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan pengolahan ikan asin akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 94% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) *Net Benefit Cost Ratio* (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan pengolahan ikan asin dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net

BCR sebesar 4,59. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan pengolahan ikan asin mampu memberikan *net benefit* sebesar 4,59 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar 4,59 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.1.7. Keragaan Usaha Perikanan : Pengolahan Bandeng Cabut Duri

a) *Net Present Value* (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan pengolahan bandeng cabut duri sebesar Rp. 61.905.803 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan pengolahan bandeng cabut duri untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 61.905.803 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan pengolahan bandeng cabut duri layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) *Internal rate of Return* (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan pengolahan bandeng cabut duri menghasilkan nilai IRR sebesar 111% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan pengolahan bandeng cabut duri akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 111% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) *Net Benefit Cost Ratio* (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan pengolahan bandeng cabut duri dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 5,40. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan

pengolahan bandeng cabut duri mampu memberikan *net benefit* sebesar 5,40 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar 5,40 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.2. Keragaan Investasi Usaha Masyarakat Perikanan Umum

Daratan

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat perikanan umum daratan menunjukkan keragaan sebagai berikut :

Tabel 5.2. Kriteria Investasi Usaha Perikanan Umum Daratan

No	Usaha Perikanan	Kriteria Investasi			Keuntungan (Rp/bln)	Keterangan
		NPV (Rp)	IRR (%)	Net BCR		
1	Rengge	49.315.062	108	4,94	1.665.666	Layak
2	Pengilar	46.122.646	110	4,93	1.546.333	Layak
3	Lukah	47.727.838	105	4,82	1.664.500	Layak
4	Karamba	70.606.467	87	4,21	2.696.250	Layak
5	Pengolah Ikan Asin	101.540.322	80	4,19	3.904.166	Layak

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

5.2.1. Keragaan Usaha Perikanan : Alat Tangkap Rengge

a) Net Present Value (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (benefit) dengan biaya (cost) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge sebesar Rp 49.315.062 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan dengan alat tangkap rengge untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 49.315.062 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha ini layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) Internal rate of Return (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge menghasilkan nilai IRR sebesar 108% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi

yang ditanamkan pada usaha perikanan dengan alat tangkap rengge akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 108% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (present value) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan dengan alat tangkap rengge dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 4,94. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan dengan alat tangkap rengge mampu memberikan net benefit sebesar 4,94 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan net benefit sebesar Rp4,94 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.2.2. Keragaan Usaha Perikanan : Alat Tangkap Pengilar

a) Net Present Value (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (benefit) dengan biaya (cost) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan dengan alat tangkap pengilar sebesar Rp 46.122.646 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan dengan alat tangkap pengilar untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 46.122.646 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan dengan alat tangkap pengilar layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) Internal rate of Return (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan dengan alat tangkap pengilar menghasilkan nilai IRR sebesar 110% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan dengan alat tangkap pengilar akan

mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 110% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan dengan alat tangkap pengilar dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 4,93. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan dengan alat tangkap pengilar mampu memberikan net benefit sebesar 4,93 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan net benefit sebesar Rp4,93 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.2.3. Keragaan Usaha Perikanan : Alat Tangkap Lukah

a) Net Present Value (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan dengan alat tangkap lukah sebesar Rp 47.727.838 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan dengan alat tangkap lukah untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 47.727.838 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha perikanan dengan alat tangkap lukah layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) Internal rate of Return (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan dengan alat tangkap lukah menghasilkan nilai IRR sebesar 105% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan dengan alat tangkap lukah akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 105%

sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan dengan alat tangkap lukah dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 4,82. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan dengan alat tangkap lukah mampu memberikan net benefit sebesar 4,82 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan net benefit sebesar Rp4,82 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.2.4. Keragaan Usaha Perikanan : Usaha Karamba

a) Net Present Value (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan budidaya karamba ikan sebesar Rp 70.606.467 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan budidaya karamba ikan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 70.606.467 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha ini layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) Internal rate of Return (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan budidaya karamba ikan menghasilkan nilai IRR sebesar 87% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan budidaya karamba ikan akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 87% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (present value) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan budidaya karamba ikan dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 4,21. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan budidaya karamba ikan mampu memberikan net benefit sebesar 4,21 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan net benefit sebesar Rp4,21 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

5.2.5. Keragaan Usaha Perikanan : Usaha Pengolahan Ikan Asin

a) Net Present Value (NPV)

Nilai NPV merupakan selisih antara manfaat (benefit) dengan biaya (cost) yang telah dijadikan nilai sekarang. Nilai NPV pada usaha perikanan pengolahan ikan asin sebesar Rp 101.540.322 yang artinya keuntungan dari usaha perikanan pengolahan ikan asin untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebesar Rp. 101.540.322 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha ini layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai NPV > 0.

b) Internal rate of Return (IRR)

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan benefit dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria IRR > OCC. Analisis yang dilakukan pada usaha perikanan pengolahan ikan asin menghasilkan nilai IRR sebesar 80% dengan OCC sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan pengolahan ikan asin akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 80% sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan bila dibandingkan dengan OCC sebesar 15%.

c) Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan pengolahan ikan asin dengan tingkat diskon 15% diperoleh nilai Net BCR sebesar 4,19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan pengolahan ikan asin mampu memberikan net benefit sebesar 4,19 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan atau penafsiran lainnya adalah Rp 1 modal investasi mampu menghasilkan net benefit sebesar Rp4,19 selama usaha berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan bila melihat nilai Net BCR > 1.

BAB

6

DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN

6.1. Perikanan Tangkap Perairan Laut

Program pemberdayaan nelayan tahun 2022 telah diterima oleh beberapa kelompok baik kelompok nelayan perairan laut maupun nelayan perairan umum daratan (PUD) yang berada di wilayah Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemberdayaan yang diterima diantaranya berupa mesin dompeng, mesin ketinting, perahu fiber serta alat penangkapan ikan. Program yang diberikan kepada kelompok tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai penunjang kegiatan produksi, menekan *cost* serta secara tidak langsung berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Agar dapat melihat sejauh mana dampak program pemberdayaan tersebut berjalan efektif, maka perlu adanya nilai pembandingan yang diambil dari nelayan yang tidak atau belum menerima program bantuan. Adapun analisis dampak program akan dilihat dari nilai (NTN) antara nelayan penerima dan nelayan non penerima program pemberdayaan.

6.1.1. Nelayan alat tangkap bagan

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan nelayan alat tangkap bagan. Pada penerimaan nelayan alat tangkap bagan yang memperoleh bantuan program pemberdayaan memiliki perbedaan sebesar Rp. 4.839.302,00 per tahun, dimana penerimaan nelayan alat tangkap bagan yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 129.168.000,00 per tahun dan nelayan alat tangkap bagan yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 124.328.698,00 per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan nelayan alat tangkap bagan yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami peningkatan sebesar 3,89% daripada nelayan alat tangkap bagan yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan bahwa program bantuan pemberdayaan memiliki

dampak dalam upaya peningkatan kinerja dari sisi penerimaan nelayan alat tangkap bagan.

Pada pengeluaran nelayan alat tangkap bagan terlihat adanya perbedaan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Terdapat perbedaan pengeluaran secara signifikan sebesar Rp. 1.204.769,00 per tahun, dimana pengeluaran nelayan alat tangkap bagan yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 76.114.533,00 per tahun dan nelayan alat tangkap bagan yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 77.319.302,00 per tahun. Secara spesifik, terlihat pengeluaran nelayan alat tangkap bagan yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami penurunan sebesar 1,56% daripada nelayan alat tangkap bagan yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Penurunan pengeluaran menjelaskan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan berperan dalam upaya peningkatan kinerja dari sisi pengeluaran nelayan alat tangkap bagan.

Tabel 6.1. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Bagan

No	Uraian/Kategori	Penerima Program Bantuan	Non Penerima Program Bantuan	Selisih	
				Nominal	%
1	Penerimaan				
	a. Usaha Perikanan	109.368.000	106.328.698	3.039.302	2,86
	b. Usaha Non Perikanan	19.800.000	18.000.000	1.800.000	10,00
	Jumlah	129.168.000	124.328.698	4.839.302	3,89
2	Pengeluaran				
	a. Usaha Perikanan	42.826.533	46.131.302	-3.304.769	-7,16
	b. Konsumsi Rumah Tangga	33.288.000	31.188.000	2.100.000	6,73
	Jumlah	76.114.533	77.319.302	-1.204.769	-1,56
3	NTN				
	a. Total Penerimaan	1,70	1,61	0,09	5,54
	b. Penerimaan Perikanan	2,55	2,30	0,25	10,80

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tingkat kesejahteraan yang dikurun dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) terlihat adanya perbedaan nilai NTN sebesar 5,54% untuk nilai NTN total penerimaan dan nilai NTN sebesar 10,80% untuk nilai NTN penerimaan perikanan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat

tangkap bagan penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,70 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,55, sedangkan Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap bagan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,61 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,30. Peningkatan kesejahteraan dan nilai NTN ini menunjukkan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan dalam upaya peningkatan kinerja nelayan alat tangkap bagan.

6.1.2. Nelayan Alat Tangkap Rengge Udang

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan nelayan alat tangkap rengge udang. Pada penerimaan nelayan alat tangkap rengge udang yang memperoleh bantuan program pemberdayaan memiliki perbedaan sebesar Rp. 1.670.400,00 per tahun, dimana penerimaan nelayan alat tangkap rengge udang yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 55.348.800,00 per tahun dan nelayan alat tangkap rengge udang yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 53.678.400,00 per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan nelayan alat tangkap rengge udang yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami peningkatan sebesar 3,11% daripada nelayan alat tangkap rengge udang yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan bahwa program bantuan pemberdayaan memiliki dampak dalam upaya peningkatan kinerja dari sisi penerimaan nelayan alat tangkap rengge udang.

Pada pengeluaran nelayan alat tangkap rengge udang terlihat adanya perbedaan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Terdapat perbedaan pengeluaran secara signifikan sebesar Rp. 189.344,00 per tahun, dimana pengeluaran nelayan alat tangkap rengge udang yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 45.238.800,00 per tahun dan nelayan alat tangkap rengge udang yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 45.428.144,00 per tahun. Secara spesifik, terlihat pengeluaran nelayan alat tangkap rengge udang yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami penurunan sebesar 0,42% daripada nelayan alat tangkap rengge udang yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Penurunan pengeluaran menjelaskan bahwa terdapat

dampak program bantuan pemberdayaan berperan dalam upaya penurunan kinerja dari sisi pengeluaran nelayan alat tangkap rengge udang.

Tabel 6.2. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Rengge Udang

No	Uraiaan/Kategori	Penerima Program Bantuan	Non Penerima Program Bantuan	Selisih	
				Nominal	%
1	Penerimaan				
	a. Usaha Perikanan	45.748.800	44.678.400	1.070.400	2,40
	b. Usaha Non Perikanan	9.600.000	9.000.000	600.000	6,67
	Jumlah	55.348.800	53.678.400	1.670.400	3,11
2	Pengeluaran				
	a. Usaha Perikanan	18.838.800	20.036.144	-1.197.344	-5,98
	b. Konsumsi Rumah Tangga	26.400.000	25.392.000	1.488.000	3,97
	Jumlah	45.238.800	45.428.144	-189.344	-0,42
3	NTN				
	a. Total Penerimaan	1,23	1,18	0,05	4.10
	b. Penerimaan Perikanan	2,43	2,23	0,20	8.90

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) terlihat adanya perbedaan nilai NTN sebesar 4,10% untuk nilai NTN total penerimaan dan nilai NTN sebesar 8,90% untuk nilai NTN penerimaan perikanan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap rengge udang penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,23 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,43, sedangkan Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap rengge udang yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,18 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,23. Peningkatan kesejahteraan dan nilai NTN ini menunjukkan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan dalam upaya peningkatan kinerja nelayan alat tangkap rengge udang.

6.1.3. Nelayan Alat Tangkap Rengge ikan

Tabel 6.3 menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan nelayan alat tangkap rengge ikan. Pada penerimaan nelayan alat tangkap rengge ikan yang memperoleh bantuan program

pemberdayaan memiliki perbedaan sebesar Rp. 1.488.000,00 per tahun, dimana penerimaan nelayan alat tangkap rengge ikan yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 49.968.000,00 per tahun dan nelayan alat tangkap rengge ikan yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 48.480.000,00 per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan nelayan alat tangkap rengge ikan yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami peningkatan sebesar 3,07% daripada nelayan alat tangkap rengge ikan yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan bahwa program bantuan pemberdayaan memiliki dampak dalam upaya peningkatan kinerja dari sisi penerimaan nelayan alat tangkap rengge ikan.

Tabel 6.3. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Rengge Ikan

No	Uraian/Kategori	Penerima Program Bantuan	Non Penerima Program Bantuan	Selisih	
				Nominal	%
1	Penerimaan				
	a. Usaha Perikanan	47.808.000	46.440.000	1.368.000	2,95
	b. Usaha Non Perikanan	2.160.000	2.040.000	120.000	5,88
	Jumlah	49.968.000	48.480.000	1.488.000	3,07
2	Pengeluaran				
	a. Usaha Perikanan	17.983.600	20.140.467	-2.156.867	-10,71
	b. Konsumsi Rumah Tangga	26.532.000	24.480.000	2.172.000	8,38
	Jumlah	44.515.600	44.620.467	-104.867	-0,24
3	NTN				
	a. Total Penerimaan	1,12	1,08	0,04	3,98
	b. Penerimaan Perikanan	2,66	2,31	0,35	15,29

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada pengeluaran nelayan alat tangkap rengge ikan terlihat adanya perbedaan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Terdapat perbedaan pengeluaran secara signifikan sebesar Rp. 104.867,00 per tahun, dimana pengeluaran nelayan alat tangkap rengge ikan yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 44.515.600,00 per tahun dan nelayan alat tangkap rengge ikan yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 44.620.467,00 per tahun. Secara spesifik, terlihat pengeluaran nelayan alat tangkap rengge ikan yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami penurunan sebesar 0,24% daripada nelayan alat

tangkap rengge ikan yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Penurunan pengeluaran menjelaskan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan berperan dalam upaya penurunan kinerja dari sisi pengeluaran nelayan alat tangkap rengge ikan.

Pada tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) terlihat adanya perbedaan nilai NTN sebesar 3,98% untuk nilai NTN total penerimaan dan nilai NTN sebesar 15,29% untuk nilai NTN penerimaan perikanan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap rengge ikan penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,12 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,66, sedangkan Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap rengge ikan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,08 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,31. Peningkatan kesejahteraan dan nilai NTN ini menunjukkan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan dalam upaya peningkatan kinerja nelayan alat tangkap rengge ikan.

6.2. Perikanan Tangkap Umum Daratan

6.2.1. Nelayan Alat Tangkap Rengge ikan

Tabel 6.4 menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan nelayan alat tangkap rengge. Pada penerimaan nelayan alat tangkap rengge yang memperoleh bantuan program pemberdayaan memiliki perbedaan sebesar Rp. 1.356.000,00 per tahun, dimana penerimaan nelayan alat tangkap rengge yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 78.024.000,00 per tahun dan nelayan alat tangkap rengge yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 76.668.000,00 per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan nelayan alat tangkap rengge yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami peningkatan sebesar 1,77% daripada nelayan alat tangkap rengge yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan bahwa program bantuan pemberdayaan memiliki dampak dalam upaya peningkatan kinerja dari sisi penerimaan nelayan alat tangkap bagan.

Pada pengeluaran nelayan alat tangkap rengge terlihat adanya perbedaan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Terdapat perbedaan pengeluaran secara signifikan sebesar Rp. 854.505,00 per tahun, dimana pengeluaran nelayan alat tangkap rengge yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 70.307.000,00 per tahun dan nelayan alat tangkap rengge yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp 71.161.505,00 per tahun. Secara spesifik, terlihat pengeluaran nelayan alat tangkap rengge yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami penurunan sebesar 1,20% daripada nelayan alat tangkap rengge yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Penurunan pengeluaran menjelaskan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan berperan dalam upaya penurunan kinerja dari sisi pengeluaran nelayan alat tangkap rengge.

Tabel 6.4. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Rengge

No	Uraian/Kategori	Penerima Program Bantuan	Non Penerima Program Bantuan	Selisih	
				Nominal	%
1	Penerimaan				
	a. Usaha Perikanan	67.824.000	64.908.000	2.916.000	4,49
	b. Usaha Non Perikanan	10.200.000	11.760.000	-1.560.000	-13,27
	Jumlah	78.024.000	76.668.000	1.356.000	1,77
2	Pengeluaran				
	a. Usaha Perikanan	24.347.000	25.993.505	-1.646.505	-6,33
	b. Konsumsi Rumah Tangga	45.960.000	45.168.000	792.000	1,75
	Jumlah	70.307.000	71.161.505	-854.505	-1,20
3	NTN				
	a. Total Penerimaan	1,11	1,08	0,03	3,01
	b. Penerimaan Perikanan	2,79	2,50	0,29	11,56

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) terlihat adanya perbedaan nilai NTN sebesar 3,01% untuk nilai NTN total penerimaan dan nilai NTN sebesar 11,56% untuk nilai NTN penerimaan perikanan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap rengge penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,11 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,79, sedangkan Nilai NTN total penerimaan

pada nelayan alat tangkap rengge yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,08 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,50. Peningkatan kesejahteraan dan nilai NTN ini menunjukkan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan dalam upaya peningkatan kinerja nelayan alat tangkap rengge.

6.2.2. Nelayan Alat Tangkap Pengilar

Tabel 6.5. menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan nelayan alat tangkap pengilar. Pada penerimaan nelayan alat tangkap pengilar yang memperoleh bantuan program pemberdayaan memiliki perbedaan sebesar Rp. 1.749.200,00 per tahun, dimana penerimaan nelayan alat tangkap pengilar yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp. 76.416.000,00 per tahun dan nelayan alat tangkap pengilar yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp.64,666,800,00 per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan nelayan alat tangkap pengilar yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami peningkatan sebesar 18,17% daripada nelayan alat tangkap pengilar yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan bahwa program bantuan pemberdayaan memiliki dampak dalam upaya peningkatan kinerja dari sisi penerimaan nelayan alat tangkap pengilar.

Pada pengeluaran nelayan alat tangkap pengilar terlihat adanya perbedaan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Terdapat perbedaan pengeluaran secara signifikan sebesar Rp.725.000,00 per tahun, dimana pengeluaran nelayan alat tangkap pengilar yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp.58.069.000,00 per tahun dan nelayan alat tangkap pengilar yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp.58.794.000,00 per tahun. Secara spesifik, terlihat pengeluaran nelayan alat tangkap rengge yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami penurunan sebesar 1,23% daripada nelayan alat tangkap pengilar yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Penurunan pengeluaran menjelaskan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan berperan dalam upaya penurunan kinerja dari sisi pengeluaran nelayan alat tangkap pengilar.

Tabel 6.5. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Pengilar

No	Uraian/Kategori	Penerima Program Bantuan	Non Penerima Program Bantuan	Selisih	
				Nominal	%
1	Penerimaan				
	a. Usaha Perikanan	59.616.000	58.186.800	1.429.200	2,46
	b. Usaha Non Perikanan	16.800.000	6.480.000	10.320.000	159,26
	Jumlah	76.416.000	64.666.800	11.749.200	18,17
2	Pengeluaran				
	a. Usaha Perikanan	21.169.000	22.854.000	-1.685.000	-7,37
	b. Konsumsi Rumah Tangga	36.900.000	35.940.000	960.000	2,67
	Jumlah	58.069.000	58.794.000	-725.000	-1,23
3	NTN				
	a. Total Penerimaan	1,32	1,10	0,22	19,64
	b. Penerimaan Perikanan	2,82	2,55	0,27	10,61

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) terlihat adanya perbedaan nilai NTN sebesar 19,64% untuk nilai NTN total penerimaan dan nilai NTN sebesar 10,61% untuk nilai NTN penerimaan perikanan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap pengilar penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,32 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,82, sedangkan Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap pengilar yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,10 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,55. Peningkatan kesejahteraan dan nilai NTN ini menunjukkan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan dalam upaya peningkatan kinerja nelayan alat tangkap pengilar.

6.2.3. Nelayan Alat Tangkap Lukah

Tabel 6.6. menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan nelayan alat tangkap lukah. Pada penerimaan nelayan alat tangkap lukah yang memperoleh bantuan program pemberdayaan memiliki perbedaan sebesar Rp.1.968.000,00 per tahun, dimana penerimaan nelayan alat tangkap lukah yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp.75.144.000,00 per tahun dan nelayan alat tangkap lukah yang tidak memperoleh

bantuan pemberdayaan sebesar Rp.73.176.000,00 per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan nelayan alat tangkap lukah yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami peningkatan sebesar 2,69% dari pada nelayan alat tangkap lukah yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan bahwa program bantuan pemberdayaan memiliki dampak dalam upaya peningkatan kinerja dari sisi penerimaan nelayan alat tangkap lukah.

Pada pengeluaran nelayan alat tangkap lukah terlihat adanya perbedaan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Terdapat perbedaan pengeluaran secara signifikan sebesar Rp.748.333,00 per tahun, dimana pengeluaran nelayan alat tangkap lukah yang memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp.64.108.667,00 per tahun dan nelayan alat tangkap lukah yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan sebesar Rp.64.857.000,00 per tahun. Secara spesifik, terlihat pengeluaran nelayan alat tangkap rengge yang memperoleh bantuan pemberdayaan mengalami penurunan sebesar 1,15% daripada nelayan alat tangkap lukah yang tidak memperoleh bantuan pemberdayaan. Penurunan pengeluaran menjelaskan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan berperan dalam upaya penurunan kinerja dari sisi pengeluaran nelayan alat tangkap lukah.

Tabel 6.6. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Alat Tangkap Lukah

No	Uraian/Kategori	Penerima Program Bantuan	Non Penerima Program Bantuan	Selisih	
				Nominal	%
1	Penerimaan				
	a. Usaha Perikanan	68.544.000	67.176.000	1.368.000	2,04
	b. Usaha Non Perikanan	6.600.000	6.000.000	600.000	10,00
	Jumlah	75.144.000	73.176.000	1.968.000	2,69
2	Pengeluaran				
	a. Usaha Perikanan	21.396.667	23.457.000	-2.060.333	-8,78
	b. Konsumsi Rumah Tangga	42.712.000	41.400.000	1.312.000	3,17
	Jumlah	64.108.667	64.857.000	-748.333	-1,15
3	NTN				
	a. Total Penerimaan	1,17	1,13	0,04	3,89
	b. Penerimaan Perikanan	3,20	2,86	0,34	11,86

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) terlihat adanya perbedaan nilai NTN sebesar 3,89% untuk nilai NTN total penerimaan dan nilai NTN sebesar 11,86% untuk nilai NTN penerimaan perikanan antara nelayan penerima program bantuan pemberdayaan dan nelayan yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan. Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap lukah penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,17 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 3,20, sedangkan Nilai NTN total penerimaan pada nelayan alat tangkap lukah yang bukan penerima program bantuan pemberdayaan sebesar 1,13 dan nilai NTN penerimaan perikanan sebesar 2,86. Peningkatan kesejahteraan dan nilai NTN ini menunjukkan bahwa terdapat dampak program bantuan pemberdayaan dalam upaya peningkatan kinerja nelayan alat tangkap pengilar.

BAB

7

STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN

Dua pendekatan digunakan untuk menganalisis pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur melalui identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari permasalahan pengelolaan. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau disingkat SWOT analisis, dan pendekatan matriks perencanaan strategis kuantitatif atau *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Gabungan dari dua pendekatan tersebut akan memberikan rekomendasi alternatif strategi terbaik bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat tiga tahapan dalam perumusan alternatif strategi yaitu tahap masukan sebagai tahap pertama, kemudian tahap pencocokan dan terakhir tahap keputusan. Tahap masukan meliputi pengelompokan hasil identifikasi dan kesimpulan dari informasi dasar dalam perumusan strategi melalui matriks evaluasi faktor internal atau *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan evaluasi faktor eksternal atau *External Factor Evaluation* (EFE). Tahap kedua terdiri dari perumusan strategi dengan penggabungan analisis SWOT dan matriks *Internal-Eksternal* (IE), dan tahap terakhir melalui identifikasi prioritas alternatif strategis sebagai kesimpulan dari semua tahapan dengan menggunakan analisis QSPM.

7.1. Identifikasi Faktor - Faktor Strategis Internal

Kekuatan (*strengths*)

Faktor kekuatan dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- 1) Terdapat keanekaragaman hayati dan sumberdaya perikanan yang memadai untuk membangun keberdayaan masyarakat / rumah tangga perikanan secara berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing
- 2) Terdapat dukungan masyarakat lokal, pemerintahan daerah dan pelaku usaha secara kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing
- 3) Terdapat kejelasan status legal formal terkait mandat pengelolaan pola ruang dan sumberdaya perikanan sebagai basis formulasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing
- 4) Telah dilakukan berbagai studi dasar terkait formulasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing
- 5) Modal sosial / komunalitas yang potensial untuk ditransformasikan menjadi kelembagaan usaha / unit bisnis yang kompetitif

Kelemahan (*weaknesses*)

Faktor kelemahan dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- 1) Belum tersedia basis data yang valid – sistematis untuk memetakan kondisi aktual pemanfaatan pola ruang dan pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagai dasar formulasi program pemberdayaan masyarakat
- 2) Kerangka dan formula program pemberdayaan yang dipengaruhi aktivitas lintas sektor belum dirumuskan secara tuntas, kolaboratif dan operasional
- 3) Faktor trauma psikologis masyarakat terhadap kegagalan program pemberdayaan di masa lalu karena faktor bias kepentingan eksternal

- 4) Kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat belum memadai untuk beroperasi sebagai unit bisnis yang berdaya saing
- 5) Faktor kerentanan ekosistem perikanan – kelautan terhadap dampak aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melebihi daya dukung dan perubahan iklim

7.2. Identifikasi faktor-faktor strategis eksternal

Peluang (*opportunities*)

Faktor peluang dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- 1) Arah kebijakan pembangunan secara global, nasional dan regional yang memprioritaskan implementasi program pemberdayaan masyarakat secara adil dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan
- 2) Terdapat dukungan jejaring kerjasama yang sinergis dengan beragam pemangku kepentingan untuk membangun model program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, berkeadilan dan berdaya saing
- 3) Telah dilakukan riset untuk pengembangan teknologi tepat guna dan skema pembiayaan khusus untuk penguatan model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing
- 4) Intensitas advokasi terkait program pemberdayaan masyarakat perikanan meningkat seiring penetapan kawasan Nusantara menjadi Ibu Kota Negara (IKN)
- 5) Perkembangan platform komunikasi konvensional dan digital untuk memperluas akses belajar dan pemberdayaan masyarakat

Ancaman (*Threats*)

Faktor ancaman dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- 1) Aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan – kelautan yang bersifat destruktif dan melanggar aturan pemanfaatan masih dilakukan sekelompok oknum

- 2) Lemahnya fungsi koordinasi antar aras dan antar sektor dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, baik pada sesama pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya perikanan maupun pemangku kepentingan dan kelompok pemanfaat dari sektor lain
- 3) Intensitas dan kontinuitas program pendampingan sebagai bagian strategis program pemberdayaan masyarakat masih rendah dalam upaya meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat / unit bisnis yang berdaya saing
- 4) Pada beberapa kawasan, terdapat status tenurial dan pemanfaatan sumberdaya yang tumpang tindih dan berpotensi konflik kepentingan dengan sesama kelompok pemanfaat sumberdaya perikanan maupun pemangku kepentingan pemanfaat sumberdaya sektor lain lain
- 5) Pengaruh aspek pragmatis (*pseudo participation*) dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan sehingga gagal membentuk kemandirian masyarakat

7.3. Evaluasi faktor internal (*internal factor evaluation*)

Evaluasi faktor internal merupakan hasil dari identifikasi faktor-faktor strategis internal berupa kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil evaluasi faktor internal berdasarkan respon dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai responden diperoleh skor dari perkalian bobot dan rating pada masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan.

Tabel 7.1. Hasil Evaluasi Faktor Internal dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan				1,725
1	Terdapat keanekaragaman hayati dan sumberdaya perikanan yang memadai untuk membangun keberdayaan masyarakat / rumah tangga perikanan secara berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	0,100	4,000	0,400
2	Terdapat dukungan masyarakat lokal, pemerintahan daerah dan pelaku usaha secara kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	0,075	3,000	0,225

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
3	Terdapat kejelasan status legal formal terkait mandat pengelolaan pola ruang dan sumberdaya perikanan sebagai basis formulasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	0,125	4,000	0,500
4	Telah dilakukan berbagai studi dasar terkait formulasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	0,075	3,000	0,225
5	Modal sosial / komunalitas yang potensial untuk ditransformasikan menjadi kelembagaan usaha / unit bisnis yang kompetitif	0,125	3,000	0,375
Kelemahan				0,700
6	Belum tersedia basis data yang valid – sistematis untuk memetakan kondisi aktual pemanfaatan pola ruang dan pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagai dasar formulasi program pemberdayaan masyarakat	0,150	1,000	0,150
7	Kerangka dan formula program pemberdayaan yang dipengaruhi aktivitas lintas sektor belum dirumuskan secara tuntas, kolaboratif dan operasional	0,075	2,000	0,150
8	Faktor trauma psikologis masyarakat terhadap kegagalan program pemberdayaan di masa lalu karena faktor bias kepentingan eksternal	0,125	2,000	0,250
9	Kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat belum memadai untuk beroperasi sebagai unit bisnis yang berdaya saing	0,075	1,000	0,075
10	Faktor kerentanan ekosistem perikanan – kelautan terhadap dampak aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melebihi daya dukung dan perubahan iklim	0,075	1,000	0,075
Jumlah		1,000		2,425

Hasil evaluasi faktor internal dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai keseluruhan yang diperoleh dari pada faktor internal sebesar 2,425, yang meliputi nilai kekuatan sebesar 1,725, dan nilai kelemahan sebesar 0,6700 yang menunjukkan nilai yang dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 2,500. Hasil ini menggambarkan bahwa pengambil kebijakan dalam melakukan pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur belum

mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimilikinya. Pengambil kebijakan belum memanfaatkan kekuatan berupa: 1) Terdapat keanekaragaman hayati dan sumberdaya perikanan yang memadai untuk membangun keberdayaan masyarakat / rumah tangga perikanan secara berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing; 2) Terdapat dukungan masyarakat lokal, pemerintahan daerah dan pelaku usaha secara kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing; 3) Terdapat kejelasan status legal formal terkait mandat pengelolaan pola ruang dan sumberdaya perikanan sebagai basis formulasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing. 4) Telah dilakukan berbagai studi dasar terkait formulasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing; dan 5) Modal sosial / komunalitas yang potensial untuk ditransformasikan menjadi kelembagaan usaha / unit bisnis yang kompetitif.

Selain itu, pengambil kebijakan juga belum dapat mengatasi kelemahan berupa: 1) Belum tersedia basis data yang valid – sistematis untuk memetakan kondisi aktual pemanfaatan pola ruang dan pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagai dasar formulasi program pemberdayaan masyarakat; 2) Kerangka dan formula program pemberdayaan yang dipengaruhi aktivitas lintas sektor belum dirumuskan secara tuntas, kolaboratif dan operasional; 3) Faktor trauma psikologis masyarakat terhadap kegagalan program pemberdayaan di masa lalu karena faktor bias kepentingan eksternal; 4) Kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat belum memadai untuk beroperasi sebagai unit bisnis yang berdaya saing; dan 5) Faktor kerentanan ekosistem perikanan – kelautan terhadap dampak aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melebihi daya dukung dan perubahan iklim.

7.4. Evaluasi faktor eksternal (*external factor evaluation*)

Hasil evaluasi faktor eksternal dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari identifikasi faktor-faktor strategis eksternal berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap pengembangan

program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tabel terlihat nilai skor keseluruhan pada evaluasi faktor eksternal sebesar 2,400 yang terdiri dari nilai peluang sebesar 1,725 dan nilai ancaman sebesar 0,675. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai evaluasi faktor eksternal dibawah nilai rata-rata 2,500, sehingga memberikan intepretasi bahwa pengambil kebijakan dalam melakukan pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur belum mampu memanfaatkan peluang utama seperti: 1) Arah kebijakan pembangunan secara global, nasional dan regional yang memprioritaskan implementasi program pemberdayaan masyarakat secara adil dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan; 2) Terdapat dukungan jejaring kerjasama yang sinergis dengan beragam pemangku kepentingan untuk membangun model program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, berkeadilan dan berdaya saing; 3) Telah dilakukan riset untuk pengembangan teknologi tepat guna dan skema pembiayaan khusus untuk penguatan model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing; 4) Intensitas advokasi terkait program pemberdayaan masyarakat perikanan meningkat seiring penetapan kawasan Nusantara menjadi Ibu Kota Negara (IKN); 5) Perkembangan platform komunikasi konvensional dan digital untuk memperluas akses belajar dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, pengambil kebijakan juga belum dapat mengatasi ancaman berupa: 1) Aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan – kelautan yang bersifat destruktif dan melanggar aturan pemanfaatan masih dilakukan sekelompok oknum; 2) Lemahnya fungsi koordinasi antar aras dan antar sektor dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, baik pada sesama pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya perikanan maupun pemangku kepentingan dan kelompok pemanfaat dari sektor lain; 3) Intensitas dan kontinuitas program pendampingan sebagai bagian strategis program pemberdayaan masyarakat masih rendah dalam upaya meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat / unit bisnis yang berdaya saing; 4) Pada beberapa kawasan, terdapat status tenurial dan pemanfaatan sumberdaya yang tumpang tindih dan berpotensi konflik kepentingan dengan sesama kelompok pemanfaat sumberdaya perikanan maupun pemangku kepentingan pemanfaat

sumberdaya sektor lain lain; dan 5) Pengaruh aspek pragmatis (pseudo participation) dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan sehingga gagal membentuk kemandirian masyarakat.

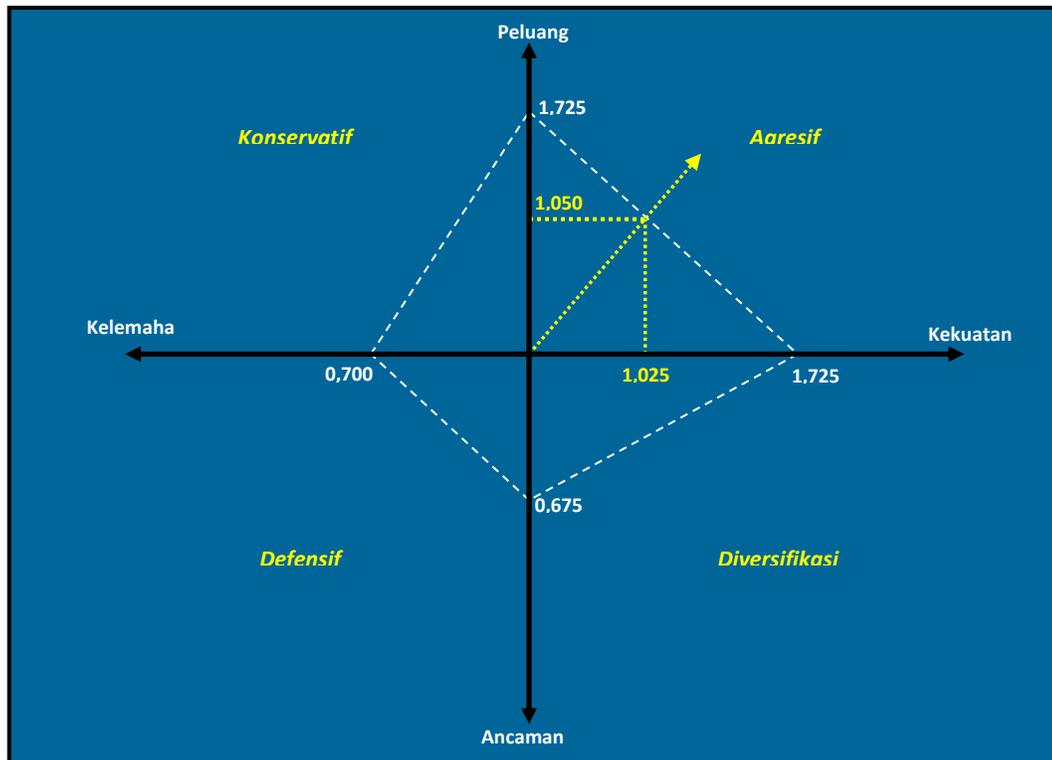
Tabel 7.2. Hasil Evaluasi Faktor Eksternal dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur

No	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang				1,725
1	Arah kebijakan pembangunan secara global, nasional dan regional yang memprioritaskan implementasi program pemberdayaan masyarakat secara adil dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan	0,125	4,000	0,500
2	Terdapat dukungan jejaring kerjasama yang sinergis dengan beragam pemangku kepentingan untuk membangun model program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, berkeadilan dan berdaya saing	0,100	3,000	0,300
3	Telah dilakukan riset untuk pengembangan teknologi tepat guna dan skema pembiayaan khusus untuk penguatan model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	0,100	3,000	0,300
4	Intensitas advokasi terkait program pemberdayaan masyarakat perikanan meningkat seiring penetapan kawasan Nusantara menjadi Ibu Kota Negara (IKN)	0,100	4,000	0,400
5	Perkembangan platform komunikasi konvensional dan digital untuk memperluas akses belajar dan pemberdayaan masyarakat	0,075	3,000	0,225
Ancaman				0,675
6	Aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan – kelautan yang bersifat destruktif dan melanggar aturan pemanfaatan masih dilakukan sekelompok oknum	0,100	1,000	0,100
7	Lemahnya fungsi koordinasi antar aras dan antar sektor dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, baik pada sesama pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya perikanan maupun pemangku kepentingan dan kelompok pemanfaat dari sektor lain	0,150	1,000	0,150
8	Intensitas dan kontinuitas program pendampingan sebagai bagian strategis program pemberdayaan masyarakat masih rendah dalam upaya meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat / unit bisnis yang berdaya saing	0,125	2,000	0,250

No	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
9	Pada beberapa kawasan, terdapat status tenurial dan pemanfaatan sumberdaya yang tumpang tindih dan berpotensi konflik kepentingan dengan sesama kelompok pemanfaat sumberdaya perikanan maupun pemangku kepentingan pemanfaat sumberdaya sektor lain lain	0,050	2,000	0,100
10	Pengaruh aspek pragmatis (pseudo participation) dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan sehingga gagal membentuk kemandirian masyarakat	0,075	1,000	0,075
	Jumlah	1,000		2,400

Profil Strategi Dalam pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur

Profil alternatif strategi dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur diperoleh dari hasil perhitungan nilai evaluasi faktor internal dan faktor eksternal. Pada sumbu X (faktor internal) diperoleh nilai dari hasil selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan dalam matriks evaluasi faktor internal, sedangkan nilai sumbu Y (faktor eksternal) merupakan hasil selisih dari nilai peluang dan ancaman pada matriks evaluasi faktor eksternal. Pada gambar terlihat hasil analisis yang menunjukkan pengambil kebijakan dalam melakukan pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur berada di kuadran agresif, di mana pengambil kebijakan berada dalam posisi yang baik untuk menggunakan kekuatannya dalam rangka memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta mampu mengatasi kelemahan-kelemahan internal dan mengatasi berbagai ancaman eksternal.



Gambar 7.1. Profil Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur

7.5. Matriks SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity, Threat*)

Penentuan formulasi alternatif strategi pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan setelah evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dianalisis melalui pencocokan faktor-faktor internal terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan dengan faktor-faktor eksternal meliputi faktor peluang dan faktor ancaman. Penentuan formulasi alternatif strategi dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil pencocokan faktor internal dan eksternal menghasilkan formulasi alternatif strategi yang terdiri dari kekuatan-peluang (S-O); strategi kelemahan-peluang (W-O); strategi kekuatan-ancaman (S-T); dan strategi kelemahan-ancaman (W-T).

Tabel 7.3. Matriks SWOT dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur

	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sumberdaya perikanan yang memadai untuk membangun keberdayaan masyarakat 2. Dukungan pemangku kepentingan secara kolaboratif untuk membangun program pemberdayaan masyarakat 3. Kejelasan status legal pengelolaan pola ruang dan sumberdaya perikanan sebagai basis formulasi program pemberdayaan masyarakat 4. Studi pendukung terkait formulasi strategi dan implementasi program pemberdayaan masyarakat 5. Modal sosial yang potensial ditransformasikan menjadi kelembagaan bisnis yang kompetitif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia basis data pemetaan pola ruang dan pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagai dasar formulasi program pemberdayaan masyarakat 2. Formula program pemberdayaan yang dipengaruhi aktivitas lintas sektor belum dirumuskan secara tuntas, kolaboratif dan operasional 3. Faktor trauma psikologis masyarakat terhadap kegagalan program pemberdayaan di masa lalu karena bias kepentingan 4. Kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat belum memadai untuk diberdayakan sebagai unit bisnis yang berdaya saing 5. Faktor kerentanan ekosistem dan sumberdaya perikanan terhadap dampak aktifitas pemanfaatan sumberdaya yang melebihi daya dukung dan perubahan iklim
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi forum kolaboratif bagi pemangku kepentingan untuk penguatan formulasi dan implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing 2. Fasilitasi jejaring publikasi dan komunikasi melalui model hibrid (media konvensional dan digital) untuk peningkatan akses belajar dan program pemberdayaan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi basis data yang diikuti sinkronisasi kewenangan dan alokasi sumberdaya sebagai basis formulasi model pemberdayaan masyarakat yang integratif, operasional dan tuntas di tingkat tapak 2. Penguatan SDM, sistem administrasi, dan informasi, teknologi tepat serta model pembiayaan berbasis kebutuhan guna sebagai komponen strategis program pemberdayaan masyarakat 3. Fasilitasi program pelatihan vokasi dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM / kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya
Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan khusus untuk membangun program percontohan sebagai mekanisme uji model pemberdayaan masyarakat pada kelompok terpilih sekaligus sebagai unit belajar komunitas di masa depan 2. Fasilitasi penyelesaian status tenurial yang tumpang tindih sesuai dengan tata aturan perundangan dan kearifan lokal sebagai penguatan program pemberdayaan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum yang diikuti proses pendampingan untuk memodifikasi perilaku destruktif dan melanggar menjadi perilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya serta berorientasi kemandirian 2. Fasilitasi pengembangan sistem adaptasi perubahan iklim sebagai faktor penguat program pemberdayaan masyarakat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat 2. Dukungan jejaring kerjasama yang sinergis untuk membangun model program pemberdayaan masyarakat 3. Riset pengembangan teknologi tepat guna dan skema pembiayaan untuk penguatan program pemberdayaan masyarakat 4. Intensitas advokasi terkait program pemberdayaan masyarakat perikanan meningkat seiring IKN 5. Perkembangan platform komunikasi konvensional dan digital untuk memperluas akses belajar dan pemberdayaan masyarakat 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktifitas pemanfaatan sumber daya yang bersifat destruktif dan melanggar aturan masih dilakukan oknum 2. Lemahnya fungsi koordinasi antar aras dan antar sektor dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat 3. Intensitas dan kontinuitas program pendampingan sebagai bagian strategis program pemberdayaan masyarakat masih rendah 4. terdapat status tenurial dan pemanfaatan sumberdaya yang tumpang tindih dan berpotensi konflik kepentingan 5. Pengaruh aspek pragmatis (pseudo participation) dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan sehingga gagal membentuk kemandirian masyarakat 	

Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh sembilan alternatif strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi:

Strategi kekuatan-peluang (S-O)

Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. Strategi tersebut menghasilkan 3 alternatif strategi meliputi:

- 1) Fasilitasi forum kolaboratif bagi pemangku kepentingan untuk penguatan formulasi dan implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing
- 2) Fasilitasi jejaring publikasi dan komunikasi melalui model hibrid (media konvensional dan digital) untuk peningkatan akses belajar dan program pemberdayaan masyarakat

Strategi kelemahan-peluang (W-O)

Strategi W-O adalah strategi yang mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. Strategi tersebut menghasilkan 3 alternatif strategi meliputi:

- 1) Revitalisasi basis data yang diikuti sinkronisasi kewenangan dan alokasi sumberdaya sebagai basis formulasi model pemberdayaan masyarakat yang integratif, operasional dan tuntas di tingkat tapak
- 2) Penguatan SDM, sistem administrasi, dan informasi, teknologi tepat serta model pembiayaan berbasis kebutuhan guna sebagai komponen strategis program pemberdayaan masyarakat
- 3) Fasilitasi program pelatihan vokasi dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM / kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya

Strategi kekuatan-ancaman (S-T)

Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yang ada dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. Kombinasi ini menghasilkan alternatif strategi meliputi 2 alternatif:

- 1) Kebijakan khusus untuk membangun program percontohan sebagai mekanisme uji model pemberdayaan masyarakat pada kelompok terpilih sekaligus sebagai unit belajar komunitas di masa depan
- 2) Fasilitasi penyelesaian status tenurial yang tumpang tindih sesuai dengan tata aturan perundangan dan kearifan lokal sebagai penguatan program pemberdayaan masyarakat

Strategi kelemahan-ancaman (W-T)

Strategi W-T merupakan strategi yang bersifat *defensive* bertujuan untuk meminimalisasi kelemahan yang dimiliki serta menghindari ancaman dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. 3 alternatif strategi ini meliputi:

- 1) Penegakan hukum yang diikuti proses pendampingan untuk memodifikasi perilaku destruktif dan melanggar menjadi perilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya serta berorientasi kemandirian
- 2) Fasilitasi pengembangan sistem adaptasi perubahan iklim sebagai faktor penguat program pemberdayaan masyarakat

7.5. Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (*Quantitative Strategic Planning Matrix-QSPM*)

Tahapan selanjutnya dilakukan setelah diidentifikasi alternatif strategi yang menggunakan pendekatan analisis SWOT dilakukan. Pada tahapan ini perumusan strategi prioritas dianalisis menggunakan pendekatan matriks QSPM. Matriks QSPM merupakan tahap pengambilan keputusan yang digunakan untuk menyusun prioritas strategi sesuai kondisi internal dan eksternal dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur. Analisis QSPM dilakukan dengan

cara memberikan nilai kemenarikan relatif (*attractive score - AS*) pada masing-masing faktor internal maupun eksternal. Strategi yang mempunyai total nilai kemenarikan relatif (*total attractive score - TAS*) yang tertinggi merupakan prioritas strategi. Urutan alternatif strategi sebagai berikut: 1) Revitalisasi basis data yang diikuti sinkronisasi kewenangan dan alokasi sumberdaya sebagai basis formulasi model pemberdayaan masyarakat yang integratif, operasional dan tuntas di tingkat tapak; 2) Fasilitasi forum kolaboratif bagi pemangku kepentingan untuk penguatan formulasi dan implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing; 3) Penguatan SDM, sistem administrasi, dan informasi, teknologi tepat serta model pembiayaan berbasis kebutuhan guna sebagai komponen strategis program pemberdayaan masyarakat; 4) Fasilitasi program pelatihan vokasi dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM / kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya; 5) Kebijakan khusus untuk membangun program percontohan sebagai mekanisme uji model pemberdayaan masyarakat pada kelompok terpilih sekaligus sebagai unit belajar komunitas di masa depan; 6) Penegakan hukum yang diikuti proses pendampingan untuk memodifikasi perilaku destruktif dan melanggar menjadi perilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya serta berorientasi kemandirian; 7) Fasilitasi penyelesaian status tenurial yang tumpang tindih sesuai dengan tata aturan perundangan dan kearifan lokal sebagai penguatan program pemberdayaan masyarakat; 8) Fasilitasi pengembangan sistem adaptasi perubahan iklim sebagai faktor penguat program pemberdayaan masyarakat; dan 9) Fasilitasi jejaring publikasi dan komunikasi melalui model hibrid (media konvensional dan digital) untuk peningkatan akses belajar dan program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 7.4. Matriks QSPM dalam pengembangan program pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur

Proritas	Kode	Alternatif Strategi	Nilai TAS
1	W-O 1	Revitalisasi basis data yang diikuti sinkronisasi kewenangan dan alokasi sumberdaya sebagai basis formulasi model pemberdayaan masyarakat yang integratif, operasional dan tuntas di tingkat tapak	7,80
2	S-O 1	Fasilitasi forum kolaboratif bagi pemangku kepentingan untuk penguatan formulasi dan implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	7,73

Proritas	Kode	Alternatif Strategi	Nilai TAS
3	W-O 2	Penguatan SDM, sistem administrasi, dan informasi, teknologi tepat serta model pembiayaan berbasis kebutuhan guna sebagai komponen strategis program pemberdayaan masyarakat	7,68
4	W-O 3	Fasilitasi program pelatihan vokasi dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM / kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya	7,65
5	S-T 1	Kebijakan khusus untuk membangun program percontohan sebagai mekanisme uji model pemberdayaan masyarakat pada kelompok terpilih sekaligus sebagai unit belajar komunitas di masa depan	7,58
6	W-T 1	Penegakan hukum yang diikuti proses pendampingan untuk memodifikasi perilaku destruktif dan melanggar menjadi perilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya serta berorientasi kemandirian	7,53
7	S-T 2	Fasilitasi penyelesaian status tenurial yang tumpang tindih sesuai dengan tata aturan perundangan dan kearifan lokal sebagai penguatan program pemberdayaan masyarakat	7,45
8	W-T 2	Fasilitasi pengembangan sistem adaptasi perubahan iklim sebagai faktor penguat program pemberdayaan masyarakat	7,38
9	S-O 2	Fasilitasi jejaring publikasi dan komunikasi melalui model hibrid (media konvensional dan digital) untuk peningkatan akses belajar dan program pemberdayaan masyarakat	7,28

FAKTOR KUNCI	ALTERNATIF STRATEGI																		
	Bobot	S-O 1		S-O 2		S-T 1		S-T 2		W-O 1		W-O 2		W-O 3		W-T 1		W-T 2	
		AS	TAS																
Kerangka dan formula program pemberdayaan yang dipengaruhi aktivitas lintas sektor belum dirumuskan secara tuntas, kolaboratif dan operasional	0,08	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30
Faktor trauma psikologis masyarakat terhadap kegagalan program pemberdayaan di masa lalu karena faktor bias kepentingan eksternal	0,13	4	0,50	4	0,50	4	0,50	3	0,38	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50
Kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat belum memadai untuk beroperasi sebagai unit bisnis yang berdaya saing	0,08	4	0,30	4	0,30	3	0,23	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30	3	0,23	4	0,30
Faktor kerentanan ekosistem perikanan – kelautan terhadap dampak aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melebihi daya dukung dan perubahan iklim	0,08	3	0,23	4	0,30	3	0,23	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30	4	0,30
EKSTERNAL																			
Peluang																			
Arah kebijakan pembangunan secara global, nasional dan regional yang memprioritaskan implementasi program pemberdayaan masyarakat secara adil dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan	0,13	4	0,50	4	0,50	3	0,38	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50
Terdapat dukungan jejaring kerjasama yang sinergis dengan beragam pemangku kepentingan untuk membangun model program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, berkeadilan dan berdaya saing	0,10	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	3	0,30	3	0,30
Telah dilakukan riset untuk pengembangan teknologi tepat guna dan skema pembiayaan khusus untuk penguatan model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	0,10	4	0,40	3	0,30	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	3	0,30	3	0,30

FAKTOR KUNCI	ALTERNATIF STRATEGI																		
	Bobot	S-O 1		S-O 2		S-T 1		S-T 2		W-O 1		W-O 2		W-O 3		W-T 1		W-T 2	
		AS	TAS																
Intensitas advokasi terkait program pemberdayaan masyarakat perikanan meningkat seiring penetapan kawasan Nusantara menjadi Ibu Kota Negara (IKN)	0,10	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40
Perkembangan platform komunikasi konvensional dan digital untuk memperluas akses belajar dan pemberdayaan masyarakat	0,08	3	0,23	3	0,23	4	0,30	3	0,23	4	0,30	3	0,23	4	0,30	4	0,30	4	0,30
Ancaman																			
Aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan – kelautan yang bersifat destruktif dan melanggar aturan pemanfaatan masih dilakukan sekelompok oknum	0,10	4	0,40	4	0,40	4	0,40	3	0,30	4	0,40	4	0,40	3	0,30	4	0,40	4	0,40
Lemahnya fungsi koordinasi antar aras dan antar sektor dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, baik pada sesama pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya perikanan maupun pemangku kepentingan dan kelompok pemanfaat dari sektor lain	0,15	4	0,60	4	0,60	3	0,45	4	0,60	4	0,60	4	0,60	4	0,60	4	0,60	4	0,60
Intensitas dan kontinuitas program pendampingan sebagai bagian strategis program pemberdayaan masyarakat masih rendah dalam upaya meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat / unit bisnis yang berdaya saing	0,13	4	0,50	3	0,38	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	3	0,38	4	0,50
Pada beberapa kawasan, terdapat status tenurial dan pemanfaatan sumberdaya yang tumpang tindih dan berpotensi konflik kepentingan dengan sesama kelompok pemanfaat sumberdaya perikanan maupun pemangku kepentingan pemanfaat sumberdaya sektor lain lain	0,05	4	0,20	4	0,20	4	0,20	4	0,20	4	0,20	4	0,20	3	0,15	4	0,20	4	0,20
Pengaruh aspek pragmatis (pseudo participation) dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan sehingga gagal membentuk kemandirian masyarakat	0,08	4	0,30	3	0,23	4	0,30	3	0,23	4	0,30	4	0,30	3	0,23	3	0,23	3	0,23
Total			7,73		7,28		7,58		7,45		7,80		7,68		7,65		7,53		7,38

BAB

8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1. Kesimpulan

1. Nilai Tukar rumah tangga nelayan perairan laut tahun 2022, pada alat tangkap bagan memiliki nilai total penerimaan sebesar 1,66, alat tangkap rengge udang sebesar 1,22 dan alat tangkap rengge ikan sebesar 1,07. Nilai NTN dari 3 alat tangkap tersebut berada di atas 1. Hal ini menggambarkan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup masih bersifat subsisten, meskipun kebutuhan untuk usaha perikananannya dapat dipenuhi.
2. Nilai Tukar rumah tangga nelayan perairan umum daratan tahun 2022, pada alat tangkap rengge ikan memiliki nilai total penerimaan sebesar 1,10, alat tangkap pengilar sebesar 1,21 dan alat tangkap lukah sebesar 1,15. Nilai NTN dari 3 alat tangkap tersebut berada di atas 1. Hal ini menggambarkan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup masih bersifat subsisten, meskipun kebutuhan untuk usaha perikananannya dapat dipenuhi.
3. Kinerja ekonomi usaha masyarakat, baik usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan berdasarkan kriteria investasi menunjukkan usaha tersebut layak untuk dilanjutkan.
4. Prioritas strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur adalah :
 - a. Revitalisasi basis data;
 - b. Fasilitasi forum kolaboratif pemangku kepentingan;
 - c. Kebijakan khusus untuk membangun program;
 - d. Fasilitasi pengembangan sistem adaptasi perubahan iklim

8.2. Rekomendasi

1. Perlu upaya peningkatan kinerja usaha perikanan tangkap dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan modal usaha perikanan dan kebutuhan konsumsi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan peningkatan skill nelayan dan pembudidaya ikan, teknik pasca panen, bantuan alat dan armada penangkapan, sosialisasi pelestarian sumberdaya perikanan, bantuan penguatan modal usaha melalui fasilitasi kemitraan usaha perikanan rakyat, Pengadaan sarana produksi perikanan.
2. Perlu evaluasi dan monitoring dalam penegakan peraturan dan perundang udangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan di wilayah perairan umum, pesisir dan laut Provinsi Kalimantan Timur dalam pencegahan usaha pengelolaan sumberdaya perikanan kurang ramah lingkungan.



Kerja Sama :

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur



Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman

Tahun 2022